



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2022





Erick Thohir
MENTERI BUMN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kementerian BUMN dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2022 dengan baik meskipun Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan bernegara.

Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Kementerian BUMN yang tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan tugas dan kewajiban selama tahun 2022. Proses penyesuaian sistem kerja berhasil dilakukan dengan baik selama tahun 2022 sehingga walaupun sebagian pekerjaan dilaksanakan secara online, hal ini tidak menghalangi kita semua untuk tetap berkinerja tinggi. Capaian kinerja Kementerian BUMN selama tahun 2022 kami laporkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada Kementerian BUMN. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum, Kinerja Kementerian selama tahun 2022 berhasil dicapai dengan baik. Kementerian BUMN secara berkelanjutan terus mendukung upaya Pemerintah dalam perbaikan ekonomi Nasional paska pandemi Covid-19. Melalui kebijakan – kebijakan pembinaan BUMN yang tepat, Kementerian BUMN dan BUMN akan terus memaksimalkan kontribusi bagi Negara di segala bidang.

Jakarta, Februari 2023
Menteri BUMN



Erick Thohir





PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



ERICK THOHIR
MENTERI BUMN

Lahir pada tanggal 30 Mei 1970, beliau ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Erick Thohir meraih *Bachelor of Arts* dari Glendale University pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari National University of California pada tahun 1993.

Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, antara lain adalah sebagai Direktur ANTV (2014), Komisaris Utama Mahaka Media, dan Ketua INASGOC Badan Pengelola Asian Games (2018).



PAHALA NUGRAHA MANSURY
WAKIL MENTERI BUMN I

Pahala Nugraha Mansury lahir di Bogor, 8 April 1971 (umur 50 tahun). Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN I, beliau merupakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) sejak 2019. Bapak Pahala Mansury memiliki pengalaman profesional dan sejumlah jabatan penting di BUMN, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2018 – 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 – 2018, Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015 – 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional yang mendahului. Beliau menamatkan pendidikan terakhir MBA di NYU Stern School of Business.



KARTIKA WIROATMODJO

WAKIL MENTERI BUMN II

Lahir pada tanggal 18 Juli 1973. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar Master of Business di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada tahun 2001.

Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015), Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016-2019).



SUSYANTO

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN

Lahir pada tanggal 4 Mei 1962. Ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020. Susyanto meraih gelar sarjana di Bidang Hukum Keperdataan dari Universitas Kediri pada tahun 1988 dan menyelesaikan Magister Hukum di STIE IBLAM pada tahun 2001. Karir beliau sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM (2013-2015), Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (2015-2018), dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM (2018-2020).



TEDI BHARATA

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Lahir pada tanggal 31 Mei 1983. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN.

Tedi Bharata meraih gelar Sarjana bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 1992 tahun 2005 dan menyelesaikan *Master of Public Administration* di Columbia University pada tahun 2016.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, antara lain menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN (2021), Vice President Office of The Board MIND ID (2019 - 2020) dan Investment Planning Manager - Telematic Industry Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016 - 2019).





CARLO B. TEWU

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Lahir pada tanggal 30 September 1962. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Carlo B. Tewu lulus Sespimpol pada tahun 1998, Pendidikan di Lemhanas pada tahun 2005, dan Sespati POLRI pada tahun 2008. Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Tipidum Bareskrim Polri (2015–2016), Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi (2016), Deputy Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenko Polhukam (2016–2020).



NAWAL NELY

DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO

Lahir pada tanggal 12 Mei 1973. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Nawal Nely meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan *Executive Master of Business Administration* di INSEAD pada tahun 2019.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Manager National Bank of Kuwait (2005–2006), *Manager Ernst & Young – Doha* (2007–2008), *Senior Manager Ernsts & Young Egypt – Cairo* (2009–2010), dan *Partner Ernsts & Young Indonesia* (2010–2020).



RABIN INDRAJAT HATTARI

STAF AHLI BIDANG INDUSTRI

Lahir pada tanggal 26 Maret 1975. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Industri sejak tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.

Rabin Indrajat Hattari meraih gelar Bachelor of Arts bidang Ekonomi dan Matematika dari The University of Georgia pada tahun 1996, menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan PhD in Economics di George Mason University pada tahun 2008.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN antara lain bekerja di Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2010 hingga menduduki jabatan terakhir sebagai *Senior Economist, Lead Advisor Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (2017 – 2018), *Research Analyst The World Bank* (2007 – 2010), dan *Research Assistant International Monetary Fund* (2002 – 2007).



WARIH SADONO

STAF BIDANG AHLI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Lahir pada tanggal 1 Maret 1963. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN sejak tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Warih Sadono meraih gelar sarjana di Bidang Hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1987, menyelesaikan Magister Manajemen di STIE IPWI pada tahun 2001, Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2005, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2018.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Deputy Penindakan KPK (2012-2015), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2015-2017), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Lanjut Pidana Khusus (2017-2018), Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019), dan Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2019-2020).



LOTO SRINAITA GINTING

STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN UMKM

Lahir pada tanggal 7 Mei 1967. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Loto Srinaita Ginting meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan menyelesaikan *Master of Commerce in Economics* di University of New South Wales pada tahun 2000.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (2012-2015) dan Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2015-2020).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Profil Pejabat Kementerian BUMN	iii	
Daftar Isi	vii	
Daftar Tabel	viii	
Daftar Gambar	viii	
Ringkasan Eksekutif	ix	
Penghargaan Kementerian BUMN Tahun sampai dengan 2022	x	
BAB 1 : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	3	
B. Maksud dan Tujuan	5	
C. Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN	5	
D. Struktur Organisasi Kementerian BUMN	6	
E. Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN	10	
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11	
BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA		
A. Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024	15	
B. Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022	17	
BAB 3 : EVALUASI CAPAIAN KINERJA		
A. Evaluasi Kinerja Tahun 2022	21	
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	23	
C. Analisis Capaian Kinerja dengan Renstra	24	
D. Realisasi Anggaran Kementerian BUMN	53	
E. Program TJSL Tahun 2022	54	
BAB 4 : PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN		61
BAB 5 : PENUTUP		
Penutup	67	
Lampiran	69	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022	18
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	25
Tabel 3.4	Capaian Produktifitas Tenaga Kerja ASN	28
Tabel 3.5	Capaian Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	28
Tabel 3.6	Capaian Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	29
Tabel 3.7	Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	30
Tabel 3.8	Capaian Kualitas Laporan Keuangan	33
Tabel 3.9	Capaian Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2018-2022	34
Tabel 3.10	Capaian Rasio BUMN dengan tingkat kesehatan kategori Sehat	35
Tabel 3.11	Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	37
Tabel 3.12	Tingkat Pengukuran IKU Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	40
Tabel 3.13	Capaian Jumlah BUMN/anak yang melakukan IPO	41
Tabel 3.14	Daftar BUMN/Anak yang telah IPO	42
Tabel 3.15	Capaian Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN	42
Tabel 3.16	Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	44
Tabel 3.17	Capaian BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap INDI 4.0	45
Tabel 3.18	Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	47
Tabel 3.19	Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018 – 2022	47
Tabel 3.20	Capaian Pembentukan Holding BUMN	48
Tabel 3.21	Capaian Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	49
Tabel 3.22	Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	50
Tabel 3.23	Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT	51
Tabel 3.24	Capaian Net Profit	52
Tabel 3.25	Capaian Kapitalisasi Saham BUMN	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2022	6
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Unit Kerja	10
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 3.1	Nominated Talent BUMN Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin	29

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN selama tahun 2022 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2021 dengan berbagai perbaikan serta penerapan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka perubahan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kementerian BUMN telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Scorecard yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang didasari oleh Peta Strategi lalu disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024. Dari total 20 (Dua Puluh) IKU yang ditargetkan pada tahun 2022, 18 (delapan belas) IKU berhasil mencapai target, sementara terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai, sebagaimana pada gambar berikut:

18 IKU (≥ 100)

90,00%

2 IKU (< 100)

10,00%

Adapun ringkasan capaian Kinerja Tahun 2022 Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Uraian IKU yang capaiannya mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan (capaian $\geq 100\%$) adalah: (1) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global; (2) Pembentukan Holding BUMN; (3) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN); (4) Realisasi Belanja Modal (CAPEX); (5) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan; (6) Net Profit; (7) Kapitalisasi Saham BUMN; (8) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN; (9) Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat (10) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN; (11) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan; (12) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO; (13) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat); (14) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri; (15) BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0; (16) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN; (17) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN; dan (18) Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN.
2. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian $< 100\%$) adalah: (1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan (2) Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN.

PENGHARGAAN KEMENTERIAN BUMN

Tahun s.d 2022



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2021,
dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada:

**Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia**

sebagai Kementerian yang memperoleh Peringkat VI
dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"
berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021



Imam Gunarto

1.

Penghargaan Kearsipan
Peringkat IV dengan
Kategori AA
"Sangat Memuaskan"
Berdasarkan hasil
pengawasan kearsipan
tahun 2021



2.

Penghargaan Laporan
Keuangan Tahun 2021
dengan Capaian
Opini WTP



**SERAH TERIMA LHP BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN BUMN

Gedung Kementerian BUMN
Kamis, 07 Juli 2022
AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Koratif





PENDAHULUAN

1



BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN
- D. Struktur Organisasi Kementerian BUMN
- E. Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN
- F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

LATAR BELAKANG

A

Badan Usaha Milik Negara memiliki peran yang penting dalam melaksanakan penguasaan pada kekuatan ekonomi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan yang dimaksud bukan untuk memonopoli, melainkan untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup seluruh Rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai landasan dan acuan dalam kebijakan pembinaan BUMN, yaitu:

1. UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia);
4. Paket UU Keuangan Negara
5. Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan

Di Indonesia, Menteri Keuangan diposisikan sebagai pengelola kekayaan Negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan permodalan/kepemilikan, sementara Menteri BUMN berwenang atas operasional dan pengelolaan/manajemen BUMN. Oleh karena itu,

Menteri BUMN berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Kewenangan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Adapun tujuan didirikannya BUMN adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Pelaksanaan maksud dan tujuan pendirian tersebut sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024. Visi dan Misi Presiden kemudian diserap menjadi Visi dan Misi Kementerian BUMN dan dimuat pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2022-2024 dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/8/2022 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2022-2024.

VISI KEMENTERIAN BUMN

"Kementerian BUMN mempunyai visi sebagai Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian BUMN;
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham;
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

MISI KEMENTERIAN BUMN

Visi dan Misi tersebut kemudian dielaborasi dengan arahan Menteri BUMN dengan adanya 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN yaitu:

1. *Economic and Social for Indonesia*

Mengatalisasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dampak sosial, mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan dan lingkungan.

2. *Business Model Innovation*

Menciptakan model bisnis baru yang menggunakan teknologi, membangun kemitraan dan mengembangkan ekosistem.

3. *Technology Leadership*

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management, advanced analytic, big data artificial intelligence*, dan lain-lain.

4. *Energize Investment*

Mengoptimalkan nilai aset menciptakan lingkungan yang mendorong investasi dalam dan luar negeri.

5. *Unleash Talent*

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan melakukan reskilling mengembangkan dan mempertahankan talenta berkualitas tinggi, serta menciptakan lingkungan inklusif bagi pemimpin.

Kelima prioritas ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan serta arahan strategis di Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan swasta baik dalam tingkat regional maupun global.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2020–2024 mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Kementerian BUMN dalam Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerja (RKT/Renja) Tahun 2022 telah menerjemahkannya dalam berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2022 secara keseluruhan terdapat 20 IKU yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian BUMN. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Kementerian BUMN didukung oleh Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, 4 Unit Eselon I dan 23 Unit Eselon II. Untuk memastikan ketercapaian target kinerja Kementerian BUMN tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, maka indikator kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahunan yang ditandatangani oleh Menteri BUMN.

Capaian atas kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

B

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Kementerian BUMN. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN BUMN

C

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagai berikut:



TUGAS

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

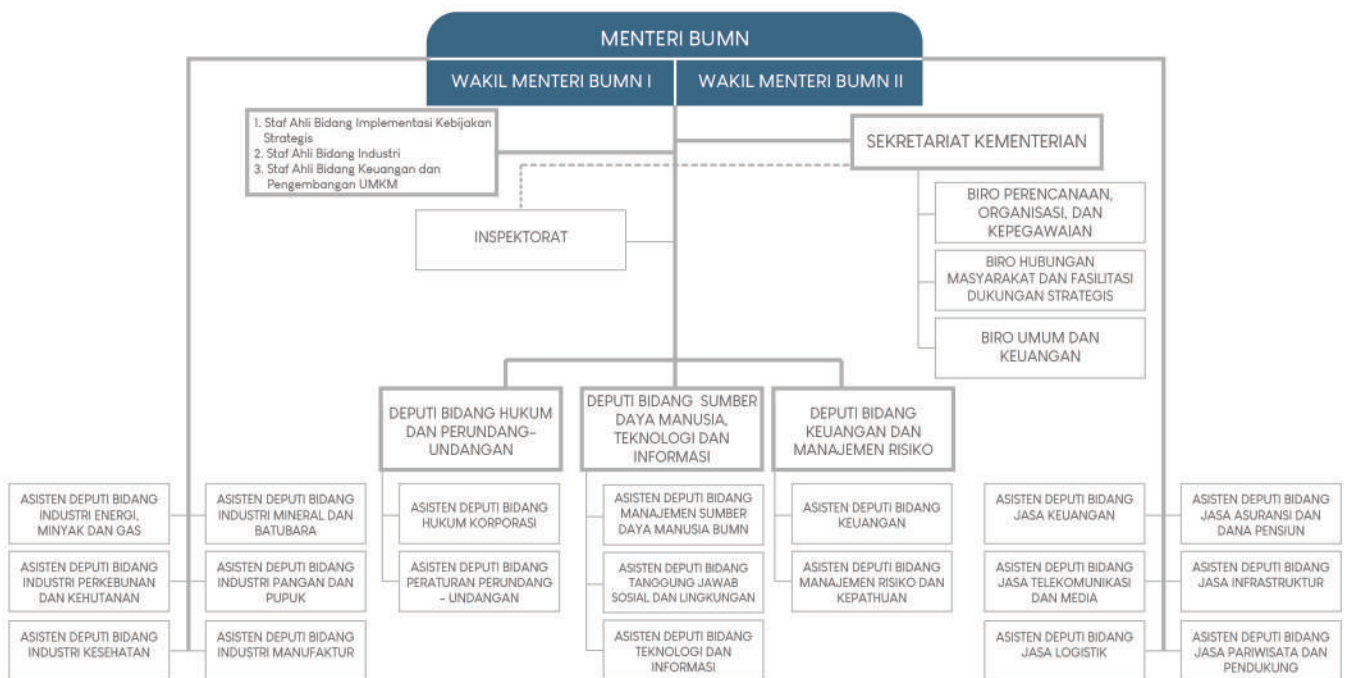


FUNGSI

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memiliki empat unit Eselon I yang terdiri atas Sekretariat Kementerian BUMN, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, serta Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memiliki Staf Ahli Kementerian BUMN yaitu pada bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Bidang Industri, serta Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM.



GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2022

Struktur Organisasi baru Kementerian BUMN merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi Kementerian BUMN dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan struktur organisasi baru tersebut diharapkan Kementerian BUMN dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan baik secara domestik maupun internasional.

Dengan adanya mandat Presiden Republik Indonesia bahwa diperlukan adanya penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, maka Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengoptimalkan jumlah Eselon I dan Eselon II hingga meniadakan sebagian besar Eselon III dan Eselon IV. Di Lingkungan Kementerian BUMN, hanya tersisa 5 (lima) Bagian (level Eselon III) dan 3 (tiga) Subbagian (Eselon IV) yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya tetap dipertahankan untuk mendukung proses bisnis tugas dan fungsi di Kementerian BUMN.

Adapun 5 bagian tersebut adalah:

- Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
- Bagian Kepegawaian (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
- Bagian Dukungan Strategis dan Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga (Biro Umum dan Keuangan); dan
- Bagian Tata Usaha dan Keuangan (Biro Umum dan Keuangan).

Pada level Subbagian (Eselon IV), terdapat 3 (tiga) jabatan Eselon IV, yaitu:

- Subbagian Dukungan Strategis Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
- Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis); dan
- Subbagian Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis).

WAKIL MENTERI BUMN I

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II memiliki ruang lingkup bidang tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian BUMN dan membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Wakil Menteri BUMN I juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Industri serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri;

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN Sektor Industri serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

WAKIL MENTERI BUMN II

Sebagaimana Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II turut melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;

- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi BUMN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

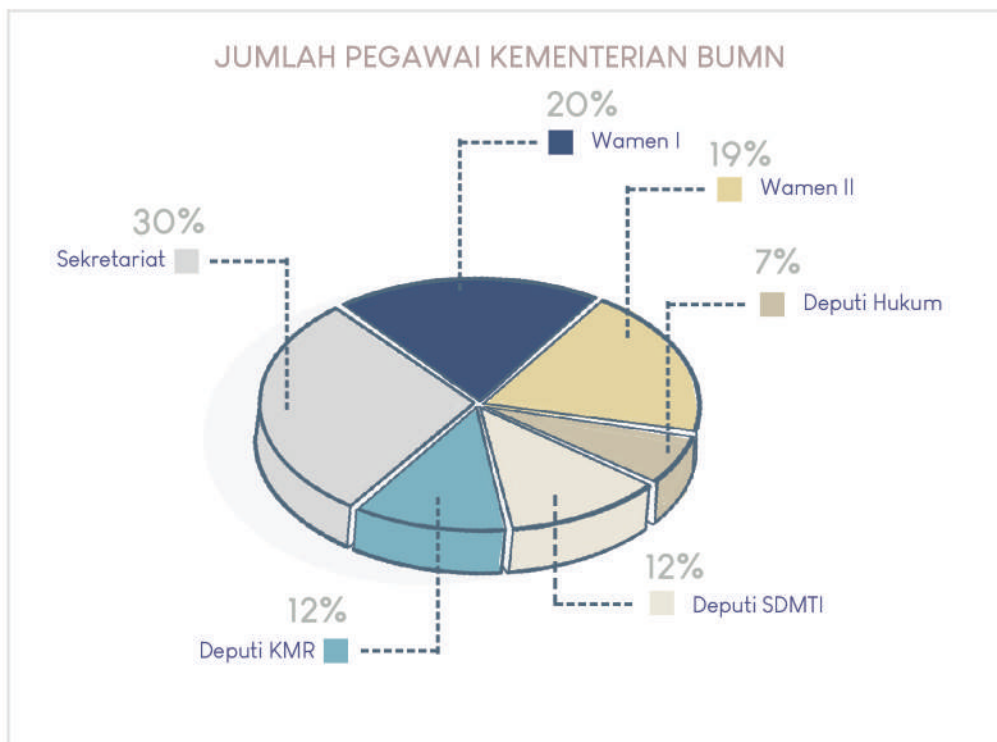
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

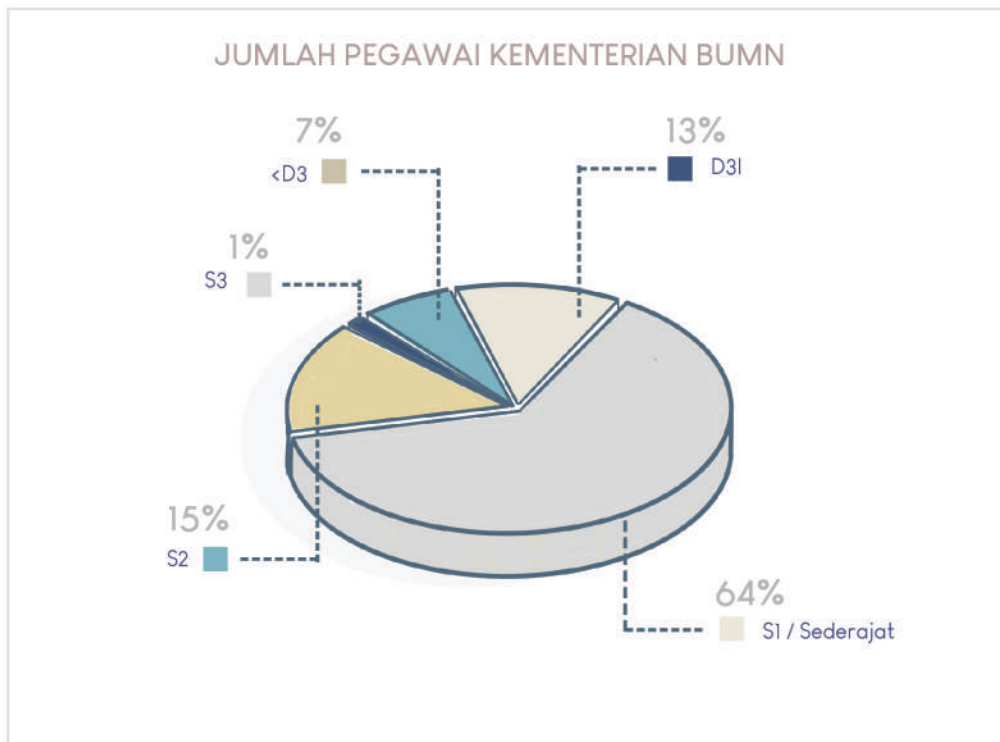
- Perumusan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN;
- Pengawasan atas kinerja, administratif, dan manajemen risiko BUMN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN BUMN

Jumlah pegawai Kementerian BUMN sampai dengan 1 Januari 2023 adalah sebanyak 494 orang. Pegawai Kementerian BUMN tersebut tersebar pada Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Wakil Menteri BUMN I 100 orang, Wakil Menteri BUMN II 98 orang, Sekretariat 145 orang, Deputi Bidang SDM dan TI 61 orang, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko 59 orang, Deputi Bidang Hukum dan PUU 34 Orang.



GAMBAR 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Unit Kerja



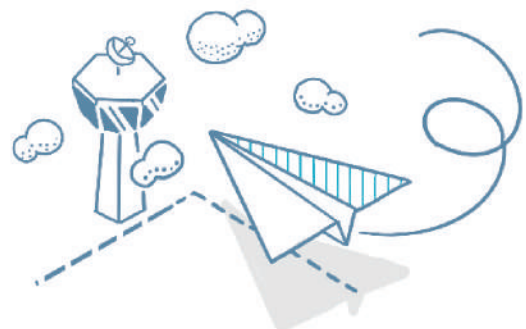
GAMBAR 1.3 Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

F

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Kementerian BUMN tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022
3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian BUMN tahun 2022
4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kementerian BUMN dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

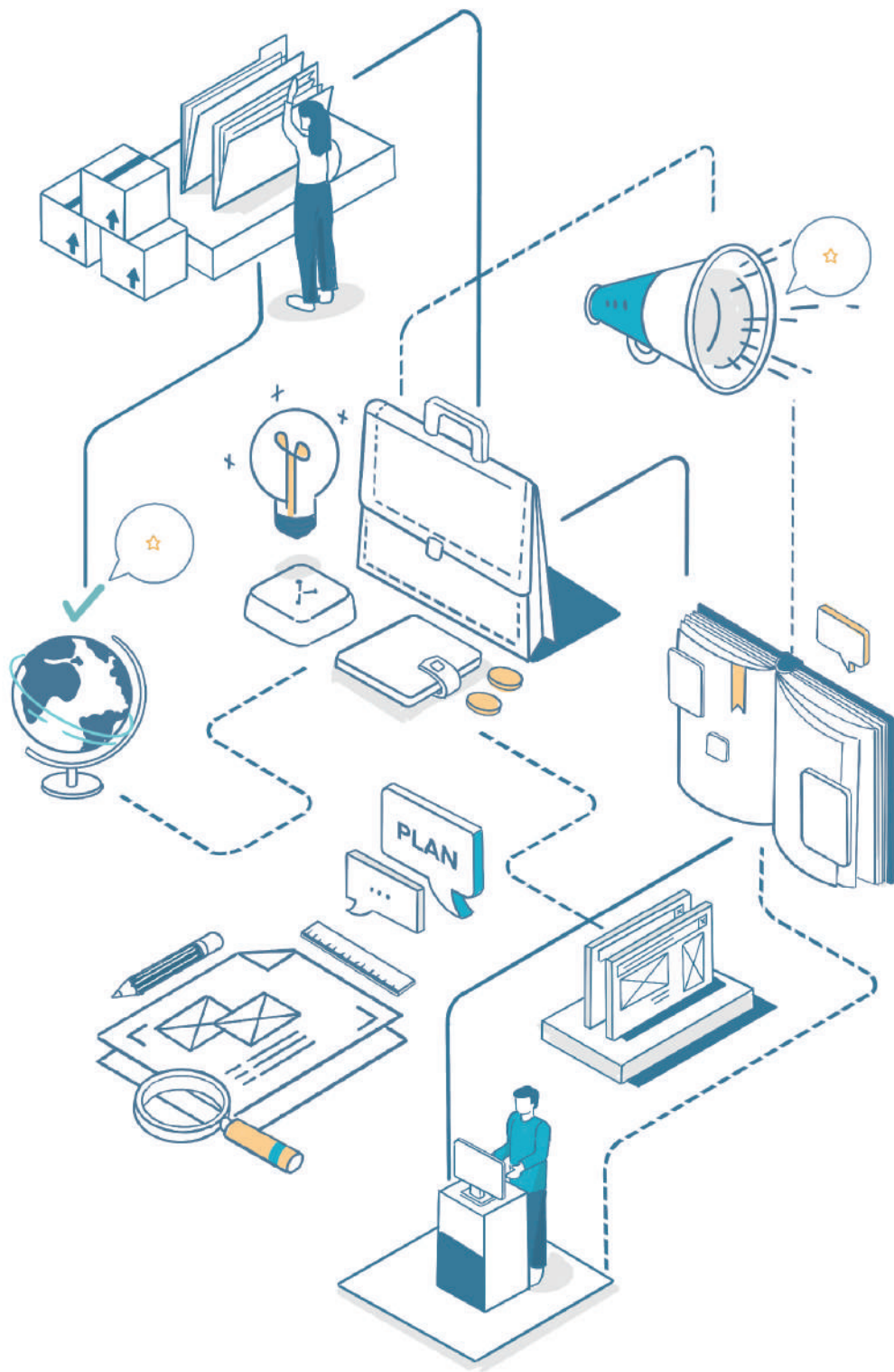






PERENCANAAN KINERJA

2



BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024
- B. Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 memiliki peran strategis. Capaian atas RPJMN 2020–2024 akan menentukan apakah target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dapat tercapai, antara lain yaitu pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC), kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai amanah RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 tersebut, Kementerian BUMN telah merumuskan visi misi Kementerian dalam suatu Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020–2024.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2020–2024

A

VISI

“Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020–2024, yaitu:



a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerjasama industri dan talenta global.



b. Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

	c. Penyederhanaan Regulasi Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan Omnibus Law. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi target Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
	d. Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
	e. Transformasi Ekonomi Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI di atas, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham BUMN senantiasa mengoptimalkan pembinaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Renstra Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.

MISI

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Kementerian BUMN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN;
- Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham
- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Kementerian BUMN merumuskan 4 (empat) Tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Adapun empat tujuan tersebut adalah:

- Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional
- Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN;
- Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN
- Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN kemudian menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020–2024. Sembilan Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2022

B

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
A. Mewujudkn Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional				
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	85,56 (Tinggi)
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	Rp 3,25M/Org
		Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	%	18,00%
		Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	%	8,00%
2	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Indeks	3,20
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN				
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	70,00%
		Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	90,00%
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	100,00%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang Telah Melakukan IPO	BUMN / Anak	36
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	50,00%
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN				
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	42
		BUMN yang Telah Mengimplementasikan Roadmap / Rekomendasi Perbaikan level INDI 4.0 BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	BUMN / Anak	12
6	BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	5
		Pembentukan Holding BUMN	Holding	2
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp Triliun	403,71
8	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	212,71
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	15,70
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp Triliun	75,37
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	2.403,59

TABEL 2.1 Penetapan Kinerja BUMN Tahun 2022

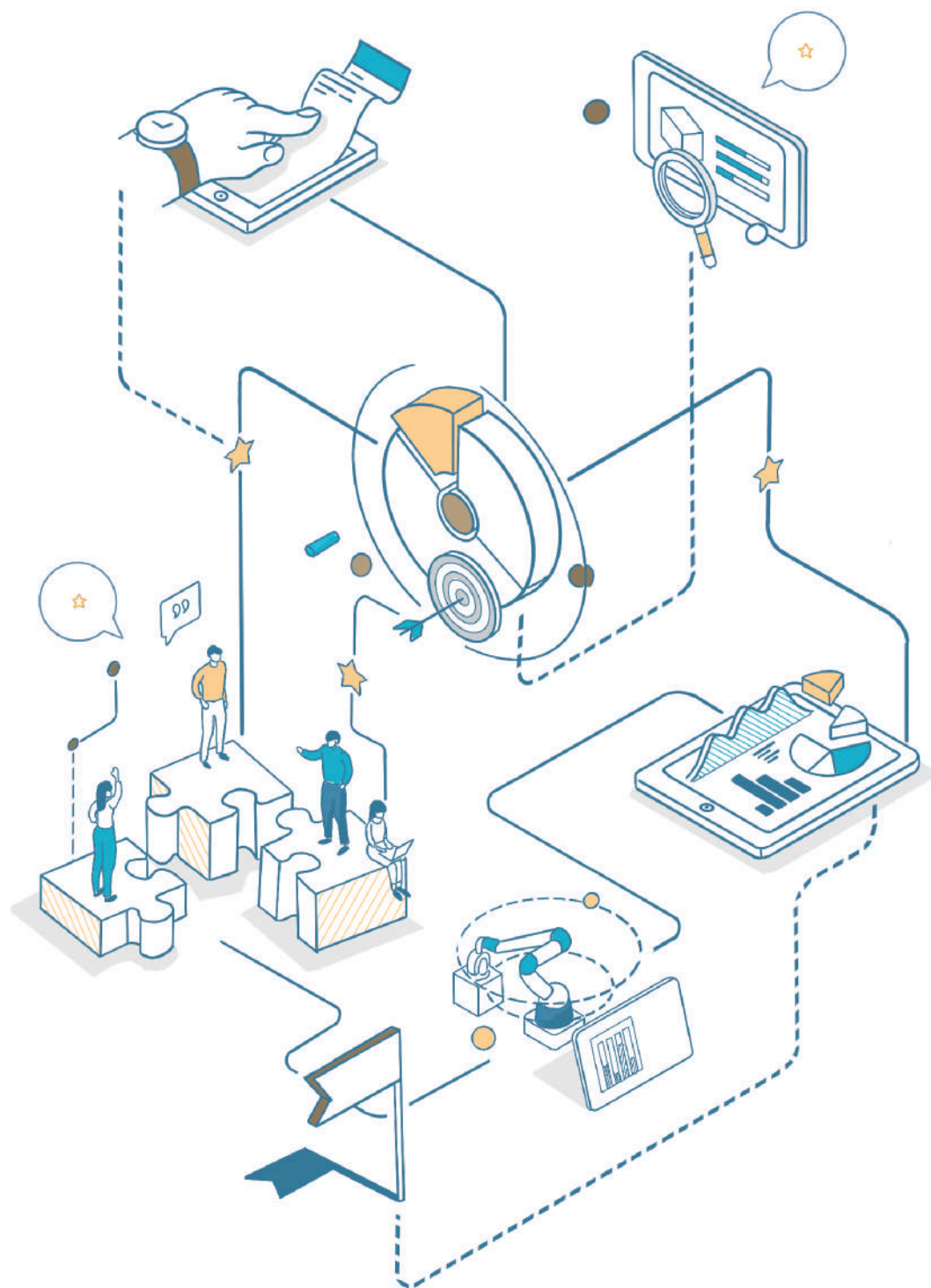
Adapun pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun 2022 setelah mengalami beberapa kali refocussing adalah sebesar Rp198.426.521.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Program	Anggaran (dalam Rupiah)
Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	46,591,231,000
Program Dukungan Manajemen	151,835,290,000
TOTAL ANGGARAN	198.426.521.000



EVALUASI CAPAIAN KINERJA

3



BAB 3 : EVALUASI CAPAIAN KINERJA

- A. Evaluasi Kinerja Tahun 2022
- B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja dengan Renstra
- D. Realisasi Anggaran Kementerian BUMN
- E. Program TJSL Tahun 2022

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

A

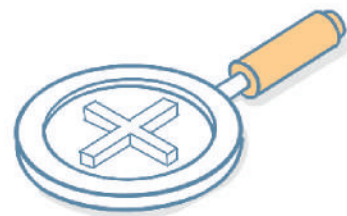
Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMN dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian BUMN yang mana juga merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada setiap periode Kementerian/Lembaga Pemerintah terus dituntut untuk meningkatkan kinerjanya walaupun dirasakan penuh tantangan. Segenap insan Kementerian BUMN tetap berkomitmen membuktikan kinerjanya dengan mencapai target-target utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan baik. Upaya perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja lebih baik lagi ke depannya.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel serta menyeluruh kepada pemangku kepentingan atas kinerja Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan cambuk untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Output dari penilaian kinerja berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai capaian kinerja organisasi Kementerian BUMN pada tahun 2022 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN. Nilai Capaian Kinerja dihitung dengan membandingkan target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sesuai dengan formula yang terdapat pada Manual IKU. NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai capaian IKU yang digunakan untuk menilai kinerja unit sehingga dapat menggambarkan kinerja pejabat yang memimpin unit kerja.

Berdasarkan penilaian, Kementerian BUMN memperoleh NKO tahun 2022 sebesar **112,21 dengan kategori "Terpuji"**. Tabel perhitungan NKO Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Nilai Kinerja Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%realisasi 2022	Capaian IKU	Nilai SS	Nilai Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
Stakeholders	BUMN Unggul di Kancan Global	1. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	5	5	100%	100,00	110,00	115,62	60	69,37
		2. Pembentukan Holding BUMN	Holding	2	4	200%	120,00				
	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	3. Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBp)	Rp Triliun	403,71	571,98	141,68%	120,00	120,00			
	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	4. Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	212,71	249,38	117,24%	117,24	118,62			
		5. Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	15,70	36,90	235,03	120,00				
	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value untuk Pemegang Saham	6. Net Profit	Rp Triliun	75,37	303,74	403,00%	120,00	113,85			
		7. Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	2.043,59	2.201	107,70%	107,70				
Internal Process	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	3,20	3,84	120,00%	120,00	110,00	109,21	20	21,84
		9. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	100,00				
	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	10. Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	70,00	76,60	109,43%	109,43	106,85			
		11. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	90,00	100,00	111,11%	111,11				
		12. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00				
	Penguatan Kapasitas BUMN	13. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang Telah Melakukan IPO	BUMN / Anak	36	36	100,00%	120,00	120,00			
		14. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	50,00	83,30	166,60%	120,00				
	Meningkatnya Daya Saing BUMN	15. Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	42	117	278,57%	120,00	110,00			
		16. BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	BUMN / Anak	12	12	100,00%	100,00				
Learning and Growth	Menciptakan SDM yang Unggul dan Professional	17. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	85,6	83,19	97,18%	97,18	104,99	104,99	20	21,00
		18. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	3,25	7,49	230,46%	120,00				
		19. Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam Direksi BUMN	%	18,00	15,80	87,78%	87,78				
		20. Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	%	8,00	9,20	115,00%	115,00				
NILAI KINERJA ORGANISASI										100%	112,21
										Terpuji	

TABEL3.1 Nilai Kerja Organisasi Tahun 2022

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B

Selama 5 Tahun terakhir, Kementerian BUMN telah berupaya secara optimal dalam memaksimalkan pencapaian Kinerja Kementerian BUMN. Berikut ikhtisar Capaian Kinerja Kementerian BUMN selama Tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022				Realisasi 2022			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional											
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	85,6	85,6	85,6	85,6	83,19	83,19	83,19	83,19
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	3,10	3,15	3,20	3,25	1,42	3,40	6,96	7,49
		Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam Direksi BUMN	%	10,00	15,00	17,00	18,00	16,00	15,40	15,50	15,80
		Rasio Keterwakilan Talenta Muda Dalam Direksi BUMN	%	5,00	6,50	7,00	8,00	9,00	8,65	9,00	9,20
2	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	n.a	n.a	n.a	3,20	n.a	n.a	n.a	3,84
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	n.a	WTP	WTP	WTP	n.a	WTP	WTP	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN											
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	67,00	67,00	76,60
		Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUMN / Anak	36	36	36	36	36	36	36	36
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	50,00	50,00	50,00	50,00	38,90	77,80	77,80	83,30
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN											
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	42	42	42	42	71	80	98	117
		BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	BUMN / Anak	n.a	n.a	n.a	12	n.a	n.a	n.a	12
6	BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	5	5	5	5	5	5	5	5
		Pembentukan Holding BUMN	Holding	2	2	2	2	2	2	2	2
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan											
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp Triliun	100,92	201,85	302,78	403,71	93,67	269,61	415,35	571,98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022				Realisasi 2022			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	52,17	106,35	169,53	212,71	32,04	80,55	133,13	249,38
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	10,00	12,50	14,00	15,70	0,80	2,80	6,60	36,9
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Net Profit	Rp Triliun	18,84	37,68	56,52	75,37	12,99	115,57	209,21	303,74
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1,900	1,941	2,002	2,043,59	2,162,55	1,977,04	2,176,76	2,201

TABEL3.2 Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022

ANALISIS CAPAIAN KINERJA DENGAN RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020-2024					Realisasi		
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional											
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	82,27	83,92	85,6	87,31	90,01	81	83,59	83,19
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	3,07	3,16	3,23	3,35	3,45	4,1	4,86	7,49
		Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam Direksi BUMN	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	15,80
		Rasio Keterwakilan Talenta Muda Dalam Direksi BUMN	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	9,20
2	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,2	2,16	3,84
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN											
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	77,00	79,00	81,00	82,00	84,00	69,00	72,00	76,60
		Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	75,00	100,00
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	85,00	100,00
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUM/Anak	33	35	37	39	50	34	35	36
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA; Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	15,00	25,00	50,00	70,00	80,00	2,40	33,00	83,30
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN											
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	30	36	42	48	54	55	127	117

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020-2024					Realisasi		
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
		BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	BUMN / Anak	n.a	n.a	n.a	12	n.a	n.a	n.a	12
6	BUMN Unggul di Kancan Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	5	5	6	6	7	4	5	5
		Pembentukan Holding BUMN	Holding	2	1	2	2	1	1	5	4
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan											
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp Triliun	365,65	413,1	472,7	540,69	682,5	377	360,8	571,98
		Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	490	532	577	627	680	278,9	317,33	249,38
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	13,00	14,70	15,70	16,80	18,00	23,30	63,30	36,90
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Net Profit	Rp Triliun	178	199	222	248	325	13,29	124,71	303,74
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.989	2.198	2.429	2.684	2.966	1.689	1.910	2.201

TUJUAN 1:

Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional

SASARAN STRATEGIS 1

Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

Kementerian BUMN terus menerus melakukan perbaikan kualitas layanan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian BUMN selaku pembina BUMN, agar BUMN tersebut menjadi Agent of Development sesuai dengan prioritas Kementerian BUMN.

Perbaikan kualitas layanan dan peningkatan kinerja Kementerian BUMN tersebut tentunya harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang andal. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah melaksanakan berbagai program yang keberhasilannya diukur melalui IKU berikut:

a. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Asesmen Indeks Penilaian Profesionalitas ASN	83,59	85,60	83,19	99,52	97,18%

TABEL3.3 Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi Pegawai ASN, Instansi Pemerintah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

- a. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Indeks pengukuran di atas dipetakan secara sederhana berdasarkan jenis kelamin, jenis jabatan dan jenjang jabatan serta tingkat Pendidikan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN diukur secara mandiri atau self assessment menggunakan format dan standar pengukuran yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2022 mengukur data yang tercatat pada Januari 2021. Jumlah pegawai yang diukur sebanyak 369 orang, terdiri dari 220 orang laki laki dan 149 orang perempuan. Adapun nilai rata-rata pada setiap dimensi indeks profesionalitas ASN, yaitu dimensi kualifikasi sebesar 14,67, dimensi kompetensi sebesar 34,92, dimensi kinerja sebesar 28,57; dan dimensi disiplin sebesar 4,93. Adapun nilai keseluruhan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,19 (kategori tinggi).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,4 poin yaitu menjadi 83,19 poin, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 83,59 poin. Penurunan Indeks Profesionalitas ASN tersebut merupakan konsekuensi yang diperoleh dari implementasi kebijakan penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional yang mengakibatkan adanya gap pada Dimensi Kompetensi karena belum terpenuhinya aspek pelatihan pejabat fungsional yang baru disetarakan secara optimal.

Adapun pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
85,29	83,19	83,59	83,00		

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi Pegawai ASN, Instansi Pemerintah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

1. Pemberian Beasiswa S1 dan S2 bagi pegawai terbaik Kementerian BUMN;
2. Penugasan belajar, baik melalui beasiswa dari instansi lain maupun melalui biaya mandiri bagi pegawai yang ingin meningkatkan kualifikasi ke Pendidikan yang lebih tinggi.
3. Penugasan untuk mengikuti pelatihan teknis dan manajerial bagi seluruh pegawai Kementerian BUMN.
4. Pelaksanaan Webinar (Web Seminar) untuk meningkatkan wawasan pegawai Kementerian BUMN di bidang yang berkaitan dengan pembinaan BUMN.
5. Optimalisasi sistem *reward & punishment* pegawai Kementerian BUMN dengan monitoring pencapaian SKP Bulanan dan pemberian penghargaan pegawai terbaik (*Employee of The Month & Employee of The Year*).
6. Monitoring dan Evaluasi disiplin pegawai secara berkala.

Tentunya terdapat tantangan dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN di Kementerian BUMN, antara lain:

1. Sistem yang dipakai dalam pencatatan dimensi profesionalitas, yaitu SAPK, sering mengalami error dan kurang compatible dengan teknologi yang digunakan secara luas saat ini, sehingga terdapat gap antara data dimensi profesionalitas sebenarnya dan data dimensi profesionalitas yang tercatat dalam sistem SAPK.
2. Dengan adanya penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, terdapat gap pelatihan fungsional yang cukup besar.

Program yang akan dilakukan dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN di Kementerian BUMN, antara lain:

1. Menutup gap yang ada antara data dimensi profesionalitas sebenarnya dan data dimensi profesionalitas yang tercatat dalam sistem SAPK.
2. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan fungsional di Kementerian BUMN, khususnya bagi pegawai yang baru disetarakan menjadi pejabat fungsional.

b. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Pendapatan/Total Tenaga Kerja Tetap	Rp4,86 M/Org	Rp 3.25 M/Org	Rp7,49 M/Org	154,11%	230,04%

TABEL3.4 Capaian Produktivitas Tenaga Kinerja BUMN

Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja BUMN ditargetkan sebesar Rp3,25 M/Orang dan capaian realisasi produktivitas tenaga kerja BUMN sebesar Rp7,49 M/Orang. Realisasi produktivitas tenaga kerja tersebut dihitung dari nilai pendapatan BUMN dibagi dengan jumlah pegawai BUMN.

Basis data pendapatan yang digunakan berasal dari Portal Anaplan, dimana pada saat perhitungan realisasi capaian IKU tahun 2022 belum seluruh BUMN melakukan pengisian data. Terdapat 16 BUMN yang belum menyampaikan data pendapatan dalam Portal Anaplan. Adapun basis data jumlah pegawai BUMN yang digunakan berasal dari hasil pengumpulan data kepada seluruh BUMN pada bulan Agustus tahun 2022. Produktivitas tenaga kerja BUMN sejak tahun 2020 terus meningkat. Hal ini terutama berkontribusi dengan adanya pembentukan Holding BUMN.

Perbandingan capaian produktivitas tenaga kerja sejak tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	Rp3,07	Rp4,10	134%
2	2021	Rp3,16	Rp4,86	154%
3	2022	Rp3,25	Rp7,49	230%

satuan: dalam Rp M/Orang

Pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN salah satunya didukung oleh inisiatif program Kementerian BUMN, yaitu antara lain Rekrutmen Bersama BUMN, Onboarding Directorship, Onboarding Commissioner, CFO School dan lainnya. Program-program dimaksud dilakukan secara terpusat melalui Forum Human Capital Indonesia sehingga masing-masing BUMN tidak perlu menyelenggarakan secara pribadi sehingga BUMN dapat lebih produktif menjalankan fungsi teknis operasionalnya. Pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN juga tidak terlepas dari kontribusi Keasdepan Teknis Pembinaan BUMN serta Keasdepan Keuangan yang secara intensif melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan BUMN.

c. Rasio keterwakilan perempuan dalam Direksi BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
(BOD Perempuan di BUMN / Total BOD di BUMN) x 100%	11,00%	18,00%	15,80%	143,63%	87,77%

TABEL3.5 Capaian Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN

Pada tahun 2022, Kementerian BUMN menargetkan rasio keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN adalah sebesar 18%. Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 41 orang Direksi BUMN dari total 260 Direksi di 41 BUMN atau terealisasi sebesar 15,80%.

Ketidaktercapaian target, dikarenakan perlu pengembangan secara bertahap dan berkesinambungan, mengingat pengembangan talenta perempuan tidak hanya dilakukan pada manajemen puncak BUMN, namun harus dimulai secara berjenjang pada berbagai jenjang level kepemimpinan di BUMN.

Keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi BUMN menjadi prioritas Kementerian BUMN sebagai bagian dari Pengembangan Talenta (*Unleash Talent*). Oleh karena itu, Kementerian BUMN terus mendorong peningkatan kepemimpinan perempuan di Grup BUMN (BUMN Induk, anak dan cucu perusahaan BUMN) melalui beberapa inisiatif strategis di antaranya dengan pembentukan Srikandi sebagai wadah profesional para pimpinan dan talenta perempuan BUMN, program pengembangan bagi talenta perempuan melalui kolaborasi dengan global institution (World Bank, ADB, INSEAD, dsb), penetapan kebijakan terkait *Respectful Workplace Policy*, serta menjadikan peningkatan Nominated Talent Perempuan sebagai salah satu KPI bagi Direksi BUMN.

Program yang akan dilakukan dalam pencapaian target pada Tahun 2023 yaitu, rencananya akan dilakukan kembali Program *Talent & Succession Management*, dimana BUMN akan diminta untuk mengusulkan Top 20% Talentnya dengan mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait Top Talent Perempuan dan *Top Talent Muda*. Selain itu, secara intensif akan berkoordinasi dengan Srikandi FHCI BUMN untuk menjalankan program-program pengembangan bagi para talenta perempuan.

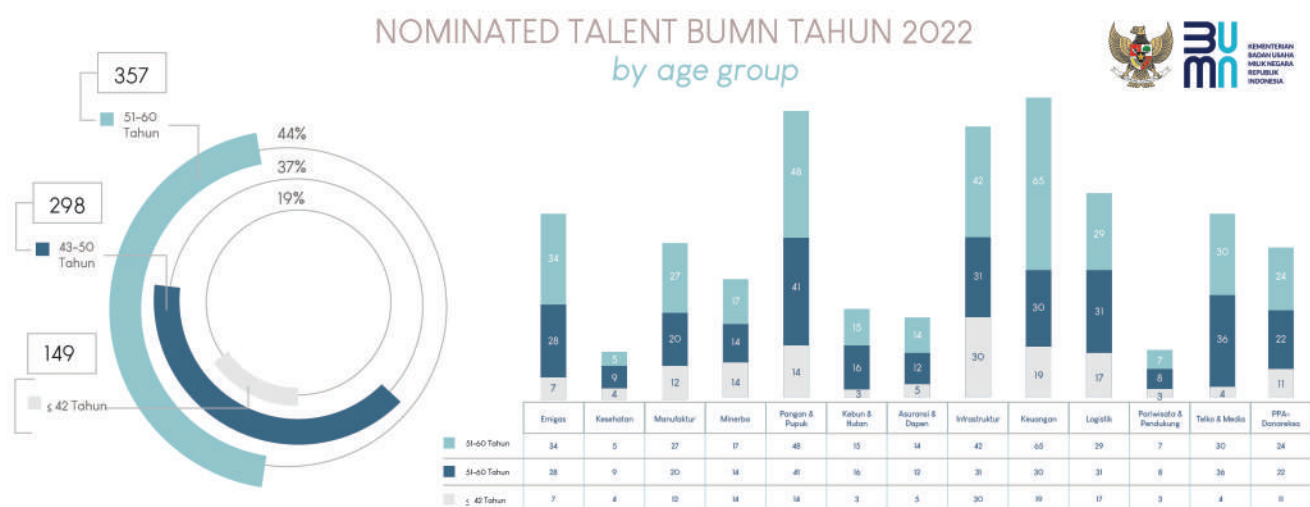
d. Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
(BOD Talenta Muda di BUMN / Total BO di BUMN) x 100%		8,00%	9,20%		115,00%

TABEL3.6 Capaian Rasio Talenta Muda dalam Direksi BUMN

Pada tahun 2022, Kementerian BUMN menargetkan rasio keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN adalah sebesar 8%. Talenta Muda yang dimaksud dalam indikator ini adalah Direksi BUMN yang berusia ≤42 tahun dan yang diangkat pada saat berusia ≤42 tahun. Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 24 orang Direksi BUMN dari total 260 Direksi di 41 BUMN atau terealisasi sebesar 9,20%.

Pencapaian keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN pada tahun 2022 salah satunya didukung oleh Program *Talent & Succession Management* yang berkelanjutan. Sejak tahun 2020, Kementerian BUMN telah melakukan penjangkaran talenta dengan meminta setiap BUMN untuk mengusulkan Top 20% BOD-1 kepada Kementerian BUMN. Dalam penyampaian talenta tersebut, BUMN diminta untuk mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait Top Talent Perempuan dan Top Talent Muda sebagaimana ditetapkan dalam Aspirasi Pemegang Saham.



AHLAK = Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

GAMBAR 3.1 Nominated Talent BUMN Tahun 2022

Berdasarkan hasil penjangkaran talenta pada tahun 2022, sebanyak 804 talenta BOD-I telah disampaikan oleh BUMN, dimana 149 orang diantaranya merupakan talenta dengan usia ≤42 tahun. Talenta yang telah disampaikan kepada Kementerian BUMN selanjutnya dikirim untuk melaksanakan Asesmen di Lembaga Penyelenggara Asesmen yang telah ditunjuk.

Program yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target tahun 2023 melalui program *Talent & Succession Management*, yang mencakup 4 kegiatan berikut:

1. Penjangkaran 20% Top Talent BUMN dengan mempertimbangkan keterwakilan Talenta Muda
2. Validasi talent oleh *Cluster Talent Committee*
3. Pengelolaan data Talent dalam *Talent Pool*
4. Pelaksanaan Asesmen bagi Talenta dalam *Talent Pool*

SASARAN STRATEGIS 2

Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat dan Akuntabel

a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Asesmen SPBE	2,16	3,20	3,84	177,77%	120,00%

TABEL3.7 Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

SPBE berfungsi untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi dalam penerapan teknologi informasi di Kementerian BUMN. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Formula yang digunakan menggunakan nilai rata-rata dari setiap aspek/indikator penilaian tingkat kematangan teknologi informasi di Kementerian BUMN. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses

- a. Rintisan : pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad hoc.
- b. Terkelola : pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi
- c. Terstandarisasi : Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
- d. Terintegrasi dan terukur : Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
- e. Optimum : Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis

- Informasi : Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
- Interaksi : Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
- Transaksi : Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
- Kolaborasi : Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.
- Optimalisasi : Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian SPBE

DOMAIN DAN ASPEK	TOTAL BOBOT
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13,00%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25,00%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10,00%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5,00%
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,50%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12,00%
Aspek 6 – Audit TIK	4,50%
Domain 4 – Layanan SPBE	45,50%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50%
Aspek 8 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	18,00%

Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2-5,0	Memuaskan
2	3,5 –< 4,2	Sangat Baik
3	2,6 –< 3,5	Baik
4	1,8 –< 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor 108 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2022 hal Pemberitahuan Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kementerian BUMN mendapat Skor 3,84 dengan predikat Sangat baik sehingga IKU Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE) mencapai 120% dari target 2022. Secara umum Indeks (skor) SPBE Kementerian BUMN di atas rata-rata SPBE Kementerian. Adapun dari nilai indeks tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Adapun beberapa hal ataupun program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam peningkatan Indeks akuntabilitas kinerja organisasi (SPBE) pada tahun 2022, yaitu:

Domain Kebijakan

- Kementerian BUMN telah menetapkan kebijakan internal sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kementerian BUMN, kebijakan ini diselaraskan dengan amanat dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE yaitu Penetapan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-127/M-BU/05/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE.
- Melakukan review dan evaluasi atas kebijakan terkait SPBE.

Domain Tata Kelola

a. Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Kementerian BUMN telah menetapkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana, dan IT Spending Plan dengan melakukan revisi Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN dengan menyesuaikan kaidah SPBE No. SK-63/MBU/S/07/2022.

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam aspek ini, Kementerian BUMN telah menerapkan SDLC serta menggunakan Infrastruktur berbagi pakai (Pusat Data Nasional).

c. Penyelenggara SPBE

Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE untuk mempercepat implementasi SPBE yang terdiri dari beberapa unit kerja terkait di Kementerian BUMN.

Domain Manajemen SPBE

a. Aspek Penerapan Manajemen SPBE

- Menetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-149/MBU/07/2022 tentang Pedoman Manajemen SPBE.
- Menetapkan SOP Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian BUMN.
- Menyusun Profil Risiko SPBE Kementerian BUMN.
- Menetapkan Tim Satu Data Kementerian BUMN yang melibatkan setiap unit kerja di Kementerian BUMN.
- Penerapan Aplikasi Yammer sebagai platform Manajemen Pengetahuan di Kementerian BUMN.
- Penerapan Layanan Helpdesk Sistem Informasi Kementerian BUMN.
- Perbaikan Layanan SPBE sesuai Hasil Survey Kepuasan Layanan TI Kementerian BUMN.

b. Aspek Audit Teknologi Informasi

Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE oleh BRIN pada tanggal 1 s.d 30 Agustus 2022 dan Audit Keamanan SPBE oleh BSSN.

Domain Layanan SPBE

a. Fokus saat ini dalam pemenuhan domain Layanan SPBE adalah dengan melakukan kolaborasi dan pemanfaatan Aplikasi Umum K/L yang telah disediakan (SAKTI, KRISNA, SRIKANDI, LAPOR, JDIHN).

b. Evaluasi dan Enhancement Aplikasi Khusus Kementerian BUMN (SiManis, PORTAL HC, PORTAL TJSL, dst).

c. Melakukan integrasi aplikasi antar K/L (Ex : Integrasi SiManis dengan SAKTI Kemenkeu)

Program Prioritas Perbaikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Perlunya peran serta dukungan dan komitmen pimpinan untuk dapat memberikan arahan kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE di lingkungan Kementerian BUMN.
- b. Menetapkan SK Proses Bisnis Kementerian BUMN sesuai standar.
- c. Melengkapi referensi seluruh domain arsitektur SPBE dan mengunggah ke dalam sistem ABACUS Kementerian PANRB.
- d. Melaksanakan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai perencanaan, serta mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE serta melakukan perbaikan penerapan Infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE.

b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%

TABEL3.8 Capaian Kualitas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:

- > Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- > Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- > Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- > Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

unqualified opinion

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**

qualified opinion

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar**

adversed opinion

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**

disclaimer of opinion

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN merupakan proses peningkatan kualitas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada lingkup Kementerian BUMN. Proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMAK BMN/SAIBA/SAKTI dari Kementerian Keuangan. Penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hasil dari Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan yaitu berupa Opini dari BPK RI yang ditargetkan tahun 2022 memperoleh Opini WTP dan realisasinya telah memenuhi target yaitu Opini WTP.

Perbandingan realisasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, realisasi 2020, realisasi 2019, realisasi 2018 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

TABEL3.9 Capaian Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2018-2022

Realisasi Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian BUMN telah memenuhi target yaitu Opini WTP. Kementerian BUMN mampu mempertahankan perolehan Opini WTP pada tahun 2022 yang merupakan Opini WTP yang ke-15 secara berturut-turut sejak tahun 2007.

Dalam mempertahankan perolehan Opini WTP atas Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022, telah dilakukan beberapa program kegiatan yang cukup intensif, diantaranya:



Memperhatikan kendala dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, strategi yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan pencapaian Opini WTP atas Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan antara lain:

1. Konsultasi secara berkala terkait sistem dan kebijakan penyusunan laporan keuangan dengan Kementerian Keuangan;
2. Komunikasi dan koordinasi dengan Unit Kerja lingkup Kementerian BUMN terkait dengan kesesuaian data dukung laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan dalam CaLK;
3. Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dan reviewer laporan keuangan dalam rangka peningkatan sistem pengendalian internal;
4. Komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan temuan pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan khususnya yang berkenaan dengan pengakuan dan pencatatan dalam laporan keuangan.

TUJUAN II : Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

a. Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	61,90%	70,00%	76,60%	123,74%	109,43%

TABEL3.10 Capaian Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori “Sehat” terealisasi sebesar 76,6% atau lebih tinggi dari targetnya yang ditetapkan sebesar 70%. Secara umum terdapat perbaikan kinerja BUMN pasca terdampak pandemi Covid-19 sehingga hal tersebut turut mendorong perbaikan pada tingkat kesehatan BUMN.

Pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan *updating* atas data realisasi tingkat Kesehatan BUMN audited tahun buku 2021 sebagaimana tabel berikut:

No	BUMN	Grade	Audited 2021
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sangat Sehat	PK-1
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sehat	PK-2
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sehat	PK-2
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sehat	PK-2
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Sehat AAA	120,0
6	PT Dana Reksa (Persero)	Sehat AAA	113,26
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sehat AAA	107,49
8	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sehat AA	91,5
9	PT Taspen (Persero)	Sehat AA	91
10	PT BioFarma (Persero)	Sehat AA	90,5
11	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Sehat AA	88,4
12	Perum Lembaga Nasional Antara	Sehat AA	88,24
13	PT Pertamina (Persero)	Sehat AA	86,87
14	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Sehat AA	84
15	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Sehat AA	84
16	PT Pos Indonesia (Persero)	Sehat AA	84
17	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Sehat AA	82
18	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sehat A	80

No	BUMN	Grade	Audited 2021
19	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Sehat A	79,9
20	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Sehat A	76
21	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Sehat A	72,5
22	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Sehat A	72,4
23	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Sehat A	72,1
24	Perum Bulog	Sehat A	72,04
25	PT Brantas Abipraya (Persero)	Sehat A	71,75
26	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Sehat A	71,25
27	Perum Perhutani	Sehat A	71
28	PT LEN Industri (Persero)	Sehat A	70,5
29	Perum LPPNPI	Sehat A	70,1
30	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sehat A	70
31	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Sehat A	69
32	PT Aviata Pariwisata (Persero)	Sehat A	69
33	PT Industri Kereta Api (Persero)	Sehat A	66,94
34	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	Sehat A	66,50
35	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sehat A	65,75
36	Perum Damri	Sehat A	65
37	PT Asabri (Persero)	Kurang Sehat BBB	65,0
38	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Kurang Sehat BBB	60,06
39	PT Hutama Karya (Persero)	Kurang Sehat BBB	58,22
40	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Kurang Sehat BBB	58,20
41	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Kurang Sehat BBB	56
42	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kurang Sehat BBB	54,18
43	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Kurang Sehat BBB	51
44	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Kurang Sehat BB	47,33
45	PT Garuda Indonesia (Persero)	Kurang Sehat BB	45
46	Perum Produksi Film Negara	Kurang Sehat BB	41
47	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Tidak Sehat CC	18

*Khusus 4 BUMN perbankan, penilaian Tingkat Kesehatan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana Peringkat Komposit (PK)-1 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat dan PK-2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat.

Banyak BUMN yang mengalami peningkatan tingkat kesehatan, tetapi ada pula beberapa BUMN yang mengalami penurunan tingkat kesehatan dari tahun sebelumnya. Turunnya tingkat kesehatan (misalnya Perum PFN dan PT Reasuransi Indonesia Utama) antara lain disebabkan kinerja perusahaan dari sisi pendapatan mengalami penurunan dan kerugian serta belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu kendala teknis lainnya dalam hal pelaporan, dimana data realisasi tingkat kesehatan BUMN terlambat disampaikan oleh BUMN melalui Portal Silaba, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemantauan dan rekapitulasi tingkat kesehatan BUMN khususnya pada periode Triwulan II sampai dengan Triwulan IV.

Program yang akan dilakukan untuk pencapaian target di tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dan monitoring bersama Keasdepan Teknis Pembina BUMN terkait perbaikan kinerja dan tingkat kesehatan BUMN.
2. Mengembangkan sistem database untuk monitoring dan pelaporan manajemen risiko dan tingkat kesehatan BUMN melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN.
3. Melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi tingkat kesehatan BUMN secara berkala yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN.
4. Akan dilakukan perubahan pengukuran tingkat kesehatan BUMN melalui metode pemeringkatan/rating oleh lembaga profesional. Hal ini akan ditetapkan dalam Omnibus Peraturan Menteri BUMN yang sedang diproses

b. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	75,00%	90,00%	100,00%	133,30%	111,10%

TABEL3.11 Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Kementerian BUMN memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal. Penyusunan peraturan internal terdiri dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri BUMN, sedangkan penyusunan peraturan eksternal terdiri dari penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, Rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga.

% Pencapaian	BUMN	Grade
0-20%	Proses penyiapan bahan penyusunan Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal.	Controllable
21-40%	Proses pembahasan draft Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal di internal Kedeputan Hukum dan Perundang-undangan.	
41-50%	Proses pembahasan draft Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal antar Eselon I di Kementerian BUMN.	
51-60%	Draft final Peraturan Menteri BUMN atau usulan atas draft peraturan eksternal disampaikan kepada Menteri BUMN.	
61-70%	Draft Peraturan Menteri BUMN maupun peraturan eksternal selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.	

% Pencapaian	BUMN	Grade
71-90%	Draft final Peraturan Menteri BUMN atau usulan atas draft peraturan eksternal ditetapkan oleh Presiden atau pimpinan K/L	uncontrollable
91-100%	Peraturan Menteri BUMN maupun peraturan eksternal dilakukan pengundangan.	

Dalam Tahun 2022, IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN ditargetkan sebesar 90%. Hal tersebut dikarenakan terdapat tahapan dari penyelesaian peraturan internal maupun peraturan eksternal dengan kontrol penyelesaiannya berada di Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Sekretariat Kabinet/Kementerian Sekretariat Negara/Kementerian/Lembaga terkait). Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang controllable bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan final rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun proses harmonisasi maupun penetapan peraturan perundang-undangan dimaksud uncontrollable bagi Kementerian BUMN.

Capaian penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Tahun 2022 adalah 100% dari target 90%, sehingga secara kumulatif tercapai 111%. Tingginya capaian realisasi target dikarenakan banyaknya peraturan Menteri BUMN yang merupakan concern dari Menteri BUMN, sehingga proses penetapannya berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan peraturan eksternal yang sangat dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses pembahasannya mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait

Peraturan Menteri BUMN yang telah diundangkan antara lain:

1

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

2

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/08/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.

3

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

4

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.



Adapun peraturan eksternal yang telah diundangkan adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara.
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Terlampauinya target IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN sebesar 100% dari target 90% dengan tingkat capaian sebesar 111% dikarenakan sebagian besar draft Peraturan Menteri BUMN yang telah memenuhi tahap harmonisasi, penetapan Menteri BUMN, sampai dengan pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga peraturan eksternal sebagian besar yang masuk pada tahapan pembahasan ketiga harmonisasi telah ditetapkan dan diundangkan.

Pada tahun 2023, terdapat program mengenai omnibus Peraturan Menteri BUMN. Program ini dilakukan dalam rangka deregulasi dan penataan kembali 45 Peraturan Menteri BUMN dan Keputusan Menteri BUMN yang bersifat regelling yang mengatur BUMN menjadi 3 Peraturan Menteri, sehingga beberapa Peraturan Menteri yang usianya lebih dari 10 tahun dan tidak sesuai dengan UU No 12/2011, serta substansi yang sama di beberapa peraturan dapat dilakukan penyesuaian melalui omnibus Peraturan Menteri BUMN ini. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah Peraturan Menteri BUMN tersebut telah memenuhi tahap harmonisasi, penetapan Menteri BUMN, sampai dengan pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

c. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	85,00%	100,00%	100,00%	117,64%	100,00%

TABEL3.12 Capaian Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi Kebijakan

Tingkat kepatuhan BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan merupakan informasi mengenai kuantitas kepatuhan seluruh BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan. Tingkat kepatuhan BUMN diperoleh dari ukuran jumlah BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan dibagi dengan jumlah seluruh BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan kualitas pengurusan perusahaan dengan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan atas penerapan GCG.

Dari keseluruhan BUMN, IKU akan tercapai maksimal apabila tidak ada laporan/indikasi BUMN yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan. Namun demikian dari setiap laporan yang masuk tersebut akan dilakukan verifikasi. Misalnya terkait dengan kewajiban penyusunan SOP kerja sama yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2017, akan diverifikasi apakah setiap BUMN telah menyusun SOP kerja sama yang ditetapkan Direksi untuk menjadi dasar pelaksanaan kerja sama di masing-masing BUMN.

Berdasarkan self assessment terhadap rekap permasalahan BUMN yang ada, terdapat 143 permasalahan yang ditangani pada periode 2022. Selanjutnya sebanyak 137 permasalahan telah selesai ditindaklanjuti melalui pendalaman dan pendampingan, dan sisanya masih dalam proses. Berdasarkan laporan yang masuk, seluruh BUMN masih tergolong patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan, sehingga realisasi tercapai 100%.

Untuk mewujudkan tingkat kepatuhan BUMN yang baik tersebut dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputy Bidang Hukum Korporasi antara lain dengan melakukan pendalaman tata kelola BUMN sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN, Keputusan Menteri BUMN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan hukum Aksi Korporasi.

Pelaksanaan pengukuran tingkat kepatuhan BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan masih memiliki beberapa kendala yaitu kompleksitas permasalahan dan jumlah permasalahan BUMN yang banyak, sumber daya manusia dan sumber anggaran yang terbatas.

Dengan memperhatikan kendala pengukuran yang dihadapi pada tahun 2022, pada 2023 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program-program pencapaian tingkat kepatuhan BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan, yaitu:

1. Upaya optimalisasi penyusunan SOP standarisasi kemampuan teknis terhadap fungsi legal khususnya pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan drafting Kerjasama melalui pelaksanaan assessment kompetensi pada setiap BUMN;
2. Peningkatan kapabilitas fungsi legal dalam penyusunan strategi penanganan perkara hukum;
3. Penguatan kapabilitas dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawasan Internal dan meningkatkan fungsi mitigasi resiko;
4. Mengoptimalkan upaya pensertifikatan dan pengamanan aset BUMN serta peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait;
5. Optimalisasi fungsi pengawasan pengelolaan keuangan pada setiap BUMN dan penerapan standar akuntansi yang berlaku umum;
6. Upaya penerapan reward and punishment dalam mewujudkan kepatuhan tata Kelola perusahaan yang baik di setiap BUMN.

SASARAN STRATEGIS 2

Penguatan Kapasitas BUMN

a. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang Telah Melakukan IPO

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	35 BUMN / Anak	36 BUMN / Anak	36 BUMN / Anak	102,85%	100,00%

TABEL3.13 Capaian Jumlah BUMN / Anak yang Melakukan IPO

Sampai dengan tahun 2022, sebanyak 36 BUMN dan Anak Usaha telah melakukan IPO dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Kode	Tanggal IPO
1	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	08-Jul-91
2	PT Timah Tbk	TINS	19-Oct-95
3	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	TLKM	15-Nov-95
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	25-Nov-96
5	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	27-Nov-97
6	PT Indofarma Tbk	INAF	17-Apr-01
7	PT Kimia Farma Tbk	KAEF	04-Jul-01
8	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	23-Dec-02
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	14-Jul-03
10	PT Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk	AGRO	08-Aug-03
11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	10-Nov-03
12	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS	15-Dec-03
13	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI	18-Mar-04
14	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA	29-Oct-07
15	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMR	12-Nov-07
16	PT Elnusa Tbk	ELSA	06-Feb-08
17	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	17-Dec-09
18	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PTPP	09-Feb-10
19	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	10-Nov-10
20	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GIAA	12-Feb-11
21	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WSKT	19-Dec-12
22	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	28-Jun-13
23	PT Wjiaya Karya Beton Tbk	WTON	08-Apr-14
24	PT PP Properti Tbk	PPRO	19-May-15
25	PT Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	20-Sep-16
26	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	GMFI	10-Oct-17
27	PT PP Presisi Tbk	PPRE	24-Nov-17
28	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	WEGE	30-Nov-17

No	Perusahaan	Kode	Tanggal IPO
29	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	IPCM	22-Dec-17
30	PT Bank BRI SyariahTbk	BRIS	09-May-18
31	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	TUGU	17-May-18
32	PT Indonesia Kendaraan TerminalTbk	IPCC	09-Jul-18
33	PT Phapros Tbk	PEHA	26-Dec-18
34	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	10-Aug-77
35	PT Dayamitra TelekomunikasiTbk	MTEL	12-Nov-21
36	PT Adhi Commuter Properti Tbk	ADCP	23-Feb-22

TABEL3.14 Daftar BUMN / Anak yang Telah IPO

Jumlah BUMN/Anak yang telah melakukan IPO pada bursa saham pada tahun 2021 adalah sebanyak 35 Perusahaan. Sedangkan pada tahun 2022 ini terdapat penambahan satu Anak BUMN yang melakukan IPO yaitu PT Adhi Commuter Properti Tbk yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kode ADCP pada tanggal 23 Februari 2022 dengan harga Rp130 per saham dimana perusahaan bergerak di bisnis property berbasis transportasi masal baik LRT Jabodetabek, bus rapid transit (Transjakarta) serta commuter line (KRL) Jabodetabek. Keseluruhan proses sebelum IPO telah dilakukan pada tahun 2021 dan awalnya ADCP berencana untuk melakukan IPO pada triwulan IV tahun 2021

Pada tahun 2022, terdapat rencana IPO PGE yang merupakan salah satu dari 88 program strategis Kementerian BUMN. Adapun berdasarkan rencana awal, IPO PGE dilakukan dengan didahului konsolidasi geothermal seluruh BUMN termasuk PT Geo Dipa Energi untuk mewujudkan suatu BUMN dengan kapasitas produksi dan pembangkitan No. 2 di dunia. Namun dikarenakan dapat berdampak kepada beban Pemerintah, maka pelaksanaan konsolidasi ditunda setelah dilakukannya IPO PGE. Hal tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Proses persiapan IPO PGE sendiri dimulai pada pertengahan Q1 tahun 2022, namun untuk IPO direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023. Selanjutnya, untuk IPO ADCP sudah direncanakan dari tahun 2021 namun dengan mempertimbangkan kondisi pasar, maka IPO ADCP dilakukan pada tahun 2022.

Program yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah Melakukan IPO pada tahun 2023 adalah:

1. Terhadap IPO PGE yang belum terlaksana di tahun 2022 dan direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023, Kementerian BUMN melakukan monitoring berkala dan memberikan masukan terkait aspek aksi korporasi yang dilakukan PGE agar sasaran strategis IPO PGE dapat terealisasi dengan baik dan sesuai ketentuan berlaku.
2. Prospek perusahaan yang baik kedepan mampu menarik minat investor. Oleh karena itu, upaya perbaikan kinerja BUMN sebelum IPO dinilai menjadi penting. BUMN perlu mempersiapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang terutama untuk pengembangan bisnis.

- b. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUMN yang tidak sehat)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Tahapan penyelesaian Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUM yang Tidak Sehat)	33,00%	50,00%	83,30%	252,42%	166,60%

TABEL3.13 Capaian Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN



Dalam rangka memperkuat struktur modal BUMN ke depan, diperlukan restrukturisasi terhadap pinjaman RDI/SLA pada BUMN. Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk meningkatkan kapasitas BUMN dalam menjalankan bisnis, kemandirian dan penugasan pemerintah dengan restrukturisasi RDI/SLA menjadi ekuitas.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung presentase proses/tahapan penyelesaian restrukturisasi RDI/SLA yang telah masuk pada APBN 2023 dibandingkan dengan seluruh tahapan penyelesaian.

Pada tahun 2022, restrukturisasi dilakukan terhadap utang RDI/SLA pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Holding Pangan dan PT Len Industri (Persero) selaku Holding Industri Pertahanan. Setelah dilakukan pengusulan oleh Menteri BUMN telah menerbitkan surat Nomor S-205/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Usulan PMN Non Tunai pada PT Len Industri (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang berasal dari Konversi RDI SLA dan Eks BPPN untuk APBN TA 2023, selanjutnya dilakukan analisis oleh SMI DJPB Kementerian Keuangan dan diterbitkan Persetujuan Konversi Utang RDI/SLA menjadi PMN oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Persetujuan Menteri Keuangan tersebut, PMN Non Tunai dari RDI/SLA untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Len Industri (Persero) masuk pada APBN 2023. Adapun untuk realisasi IKU pada tahun 2022 sebesar 83,3% dari target 50%.

Selama tahun 2022, Kementerian BUMN telah mencapai beberapa tahap dalam rangka restrukturisasi utang RDI SLA antara lain :

1. Holding Pangan dan Pertahanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi dan persetujuan RPK ke Kementerian BUMN.
2. Kementerian BUMN menerbitkan Surat Rekomendasi dan Surat Persetujuan RPK.
3. BUMN Holding Pangan dan Industri Pertahanan menyampaikan surat permohonan restrukturisasi utang RDI SLA serta seluruh dokumen persyaratan kepada Kementerian Keuangan (termasuk Surat Rekomendasi, FDD, LDD, RPK dan Surat Persetujuan RPK).
4. Rapat Pleno antara Kementerian Keuangan, BUMN, dan KBUMN untuk membahas RPK, LDD, dan FDD.
5. DJPB menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
6. Menteri Keuangan menyampaikan surat persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN.
7. KBUMN menyampaikan usulan konversi Utang RDI SLA menjadi PMN Non Tunai kepada Komisi VI DPR.
8. Pembahasan dengan Komisi VI DPR.
9. Penetapan APBN 2023.

Program yang akan dilakukan dalam pencapaian target pada Tahun 2023 yaitu untuk restrukturisasi utang RDI/SLA menjadi PMN pada PT RNI (Persero) dan PT Len Industri (Persero), akan dilaksanakan proses Penerbitan PP PMN Non Tunai dengan langkah-langkah Pembahasan Antar Kementerian, Penandatanganan Berita Acara Pembahasan Antar Kementerian, dan Rapat Harmonisasi PP PMN Non Tunai dengan instansi terkait.

TUJUAN III :
Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN

SASARAN STRATEGIS I
Meningkatkan Daya Saing BUMN

a. Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Negara Tujuan Ekspor minimal USD10.000	127 Negara	42 Negara	117 Negara	92,12%	278,57%

TABEL3.16 Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

BUMN *Go Global* dimulai sejak 17 Juli 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Strategi ini merupakan pengembangan dari peningkatan nilai dan penguatan value chain yang merupakan perluasan nilai dari Lima Prioritas BUMN.

BUMN *Go Global* memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk BUMN agar diserap oleh pasar global, menyatukan kekuatan BUMN di luar negeri sehingga menciptakan efisiensi operasional dan memperbaiki supply chain dengan melakukan investasi atau akuisisi perusahaan di luar negeri. Sasaran strategis adalah peningkatan daya saing BUMN melalui indikator kinerja berupa peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri diukur berdasarkan jumlah negara tujuan ekspor.

Aktivitas ekspor BUMN memiliki potensi yang cukup tinggi terlihat dari peningkatan jumlah negara tujuan BUMN dengan nilai transaksi diatas USD 10,000 pada periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Negara Tujuan
1	2018	55
2	2019	51
3	2020	50
4	2021	127
5	2022	117

Pada tahun 2022, jumlah negara tujuan ekspor BUMN adalah sebanyak 117 Negara, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 42 Negara. Berdasarkan ringkasan data, Negara tujuan ekspor BUMN berasal dari Negara lintas benua yaitu Asia, Amerika, Australia, Afrika dan Eropa. Dari sisi sektor aktivitas ekspor BUMN juga tergolong beragam yaitu minerba, energi minyak dan gas, kesehatan, manufaktur, pertahanan, konstruksi, asuransi, perkebunan serta pangan dan pupuk.

Dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan daya saing BUMN dan strategi BUMN *Go Global*, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 terdiri dari:

1. Pembentukan Indonesia Incorporated Hongkong yang terdiri dari lima BUMN yaitu HIMBARA (BNI, Mandiri dan BRI), Telkom Indonesia dan Garuda Indonesia pada Triwulan II 2022.
2. Penandatanganan SK Bersama BUMN *Go Global* yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN dan Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri pada Triwulan II 2022.

SOE International Conference di Bali pada tanggal 17 – 18 November 2022, terdiri dari Asia CEO Meeting, MoU Pertamina dengan Trafigura Group Pte Ltd, Biofarma dengan ProFactor Pharma Ltd (PF), Joint Development Agreement antara MIND ID dengan Arrival Ltd dan Public Lecture dari London School of Economics (LSE).

Terdapat lima tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan daya saing BUMN dan strategi BUMN Go Global terdiri dari:



Terdapat program yang berkaitan dengan BUMN Go Global dan secara lebih luas akan mampu meningkatkan potensi pasar BUMN ke Luar Negeri dan meningkatkan daya saing BUMN yaitu menilai seluruh BUMN berdasarkan kluster untuk menentukan BUMN yang cocok dan siap untuk mengikuti program BUMN Go Global. Output yang diharapkan adalah matriks kesiapan BUMN untuk melakukan perluasan secara global dengan target pelaksanaan di tahun 2023.

- b. BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0	12 BUMN / Anak	12 BUMN / Anak	12 BUMN / Anak	100,00%	100,00%

TABEL3.17 BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0

Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-787/MBU/10/2021 hal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022, tercantum bahwa BUMN yang belum melaksanakan Assessment INDI 4.0 di tahun 2021 wajib melaksanakan di tahun 2022. Bagi BUMN yang belum mencapai skor 3,5 wajib menyusun dan mengimplementasikan roadmap pemenuhan gap, sedangkan BUMN yang telah mencapai skor minimal 3,5 wajib melaporkan implementasi transformasi Industri 4.0 pada Laporan Manajemen Triwulanan BUMN.

Sehubungan hal tersebut, Kementerian BUMN melakukan monitoring dan evaluasi pada BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di tahun 2022. Tujuan IKU tersebut adalah untuk akselerasi BUMN dalam bertransformasi ke Industry 4.0.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian BUMN, daftar BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	Perusahaan	No	Perusahaan
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7	PT Asabri (Persero)
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
3	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9	Perum Perhutani
4	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	10	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
5	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
6	PT Bio Farma (Persero)	12	PT Pegadaian

Berdasarkan daftar diatas, terdapat 12 BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0. Sehingga IKU BUMN tersebut mencapai 100% dari target 12 BUMN.

Adapun program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam pencapaian target BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0, yaitu:

1. Mensosialisasikan Aspirasi Pemegang Saham RKAP tahun 2022 kepada BUMN tentang pelaksanaan *assessment* INDI 4.0 dan penyusunan serta implementasi *roadmap/rekomendasi* pemenuhan gap berdasarkan hasil *assessment* tersebut.
2. Menyampaikan Surat Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Nomor S-10/DSI.MBU.C/07/2022 hal tindak lanjut pemenuhan gap untuk perbaikan level INDI 4.0 BUMN.
3. *Monitoring* penyusunan dan implementasi *roadmap/rekomendasi* pemenuhan gap BUMN.

Pada prinsipnya program *assessment* INDI 4.0 di BUMN berjalan dengan efektif, namun terdapat sedikit kendala, yaitu terdapat dinamika holding/merger BUMN sehingga beberapa BUMN tersebut menunda pelaksanaan *assessment* INDI 4.0 dan berdampak pada keterlambatan penyusunan *roadmap* pemenuhan gap hingga implementasinya.

Dengan memperhatikan kendala pengukuran yang dihadapi pada Tahun 2022, pada 2023 direncanakan akan dilakukan peningkatan terhadap program BUMN yang telah melakukan *assessment* INDI 4.0 (*Indonesia Industry 4.0 Readiness Index*) yaitu:

1. Melakukan sosialisasi APS RKAP Tahun 2023 untuk mendorong BUMN yang belum mencapai skor minimal 3,5 agar segera menyusun *roadmap* perbaikan level INDI 4.0, sedangkan bagi BUMN yang telah mencapai skor 3,5 agar segera menyusun *action plan* perbaikan level INDI 4.0 yang mengacu pada rekomendasi dari Lembaga Asesor. Laporan hasil implementasi atas *roadmap/action plan* tersebut ditargetkan dapat disampaikan kepada Kementerian BUMN pada awal Desember 2022
2. Memberikan standar/*guideline* penyusunan *roadmap* pemenuhan gap dalam rangka akselerasi transformasi digital/ Industry 4.0 kepada BUMN;
3. Melakukan *monitoring* penyusunan dan penyampaian hasil implementasi *roadmap/action plan* perbaikan level INDI 4.0 oleh BUMN.

a. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	100,00%	100,00%

TABEL3.18 Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

BUMN yang masuk peringkat global seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000 menjadi pencapaian Indikator Kinerja Utama ini. Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik Pemerintah teratas, peringkat berdasarkan total pendapatan yang tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya. Selain Global Fortune 500, Forbes juga merilis daftar 2000 perusahaan global terbesar di dunia dengan empat aspek penilaian, yakni sales, profit, aset, dan market value.

Di tahun 2022, jumlah BUMN yang masuk peringkat Global adalah sebanyak 5 (lima) BUMN atau sama dengan target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Forbes Global 2000

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

3. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Global Fortune 500

1. PT Pertamina (Persero)

BUMN yang masuk peringkat global di tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dengan peringkat yang lebih meningkat. Adapun rincian BUMN dan peringkat yang masuk ke dalam kedua peringkat tersebut selama 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Kategori	BUMN	Peringkat				
		2018	2019	2020	2021	2022
Global Fortune 500	PT Pertamina (Persero)	253	175	-	287	233
Forbes 2000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515	363	347	362	349
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	469	481	495	507	489
	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	720	747	708	762	745
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	903	835	1.053	1.742	1.153

TABEL3.19 Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018-2022

Meningkatnya peringkat global BUMN di tahun 2022 menunjukkan BUMN telah berhasil bangkit dari pandemi Covid19, serta dapat terus tumbuh dan semakin tangguh. Hal ini juga menjadi pengakuan atas perbaikan kinerja, optimalisasi layanan serta transformasi digital. Transformasi menjadi langkah strategis beradaptasi dengan perubahan bisnis, bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif.

Selain itu, *Synergy value* BUMN dan anak perusahaan juga dilakukan. Sinergi ini mampu memperkuat layanan terutama yang berbasis digital, mendorong inovasi, serta meningkatkan pengalaman bagi konsumen.

PT Pertamina (Persero) kembali menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia dan BUMN yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2022. PT Pertamina (Persero) berada di peringkat 223, naik 64 peringkat dibandingkan 2021 di posisi 287. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan peringkat Forbes 2000 menjadi 349 dan mampu membukukan laba Rp39,31 triliun atau tumbuh 106,14% YoY dalam 9 bulan pertama tahun 2022.

Setelah berhasil menunjukkan peran dalam penanganan Covid-19, tantangan dinamika ekonomi global dan inflasi dihadapi Indonesia pada tahun 2022. Resesi ekonomi menjadi tantangan BUMN dalam pencapaian target kinerja tahun 2022. Untuk itu, optimalisasi bisnis di tengah tantangan dinamika ekonomi menjadi kunci utama di balik kesuksesan BUMN.

Dalam menghadapi tantangan di 2023, BUMN melanjutkan transformasi perusahaan dalam memperkuat ekosistem layanan serta strategi akan ditempuh dengan mendorong efisiensi untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

b. Pembentukan Holding BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Holding yang terbentuk	5 Holding	2 Holding	4 Holding	80,00%	200,00%

TABEL3.20 Capaian Pembentukan Holding BUMN

Inisiatif holding yang dilaksanakan pada tahun 2022 ada 4 Holding atau terealisasi lebih banyak dari target 2022 sebanyak 2 Holding. Holding baru yang terbentuk di tahun 2022 yaitu Holding BUMN Industri Pertahanan, Holding Danareksa, Konsolidasi PT Industri Nuklir Indonesia ke Holding BUMN Farmasi, serta Konsolidasi PT Semen Baturaja Tbk ke Holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dalam rangka pembentukan holding BUMN, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah:



1. Koordinasi Pembentukan Holding BUMN

Dalam rangka pembentukan holding ini, dilakukan koordinasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang akan menjadi bagian holding, kegiatan monitoring benchmark pembentukan holding, rapat pembahasan/pendalaman materi kajian holding, focus group discussion (FGD), serta konsultan yang membantu perumusan pembentukan holding BUMN.



2. Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembentukan Holding BUMN

Dalam rangka pembentukan holding ini, dilakukan koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian holding, rapat pembahasan/pendalaman materi kajian holding, focus group discussion (FGD), serta rapat pembahasan antar Kementerian (PAK) dan rapat harmonisasi RPP.

Holding BUMN yang terbentuk selama tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Holding BUMN	Tanggal IPO
1	Holding BUMN Industri Pertahanan (PT LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana)	PP Nomor 5 Tahun 2022
2	Holding Danareksa (PT Danareksa, PT Nindya Karya, PT PPA, PT KBI, PT KIM, PT KIW, PT KIMA, PT KBN, PT Balai Pustaka, PT JIEP, PT SIER)	PP Nomor 7 Tahun 2022
3	Konsolidasi PT Industri Nuklir Indonesia ke Holding BUMN Farmasi	PP Nomor 10 Tahun 2022
4	Konsolidasi PT Semen Baturaja Tbk ke Holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	PP Nomor 33 Tahun 2022

Proses pembentukan Holding BUMN berbasis sektoral dilakukan melalui tahapan-tahapan dan membutuhkan pengkajian secara komprehensif, serta koordinasi lintas instansi sehingga relatif memakan waktu yang cukup lama.

Diperlukan dukungan dan persetujuan Pemerintah berupa adanya koordinasi antar Kementerian yang baik serta pelaksanaan secara tepat waktu dan tanpa hambatan atas penyusunan serta penetapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pembentukan Holding BUMN.

Program yang akan dilakukan untuk pencapaian target tahun 2023 yaitu meningkatkan efektivitas koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian holding, serta mengoptimalkan kegiatan pembahasan atau pendalaman materi kajian holding, focus group discussion (FGD), serta konsultan yang membantu perumusan pembentukan Holding BUMN.

TUJUAN IV :

Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS 1

Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara

a. Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal BUMN	Rp360,80 Triliun	Rp403,71 Triliun	Rp572 Triliun	158,53%	141,68%

TABEL3.21 Capaian Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

Realisasi kontribusi BUMN kepada Negara dalam bentuk dividen, pajak dan PNBP Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp571,98 triliun atau 141,68% dibandingkan dengan target seiring dengan adanya peningkatan laba bersih pada sebagian besar klaster pada tahun 2022. Hal ini utamanya didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, penguatan harga komoditas, pemulihan kegiatan ekonomi serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi

Perkembangan realisasi kontribusi BUMN dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uang (Rp Triliun)	2018	2019	2020	2021	2022*
Dividen	44	50	44	30	40
Pajak	245	285	247	244	435
PNBP Lainnya	166	136	86	87	98
TOTAL	455	471	377	361	572

*Data Unaudited per 8 Februari 2023

Catatan: Realisasi Pajak dan PNBP berdasarkan kinerja Tahun Buku Y. Untuk Dividen berdasarkan kinerja Tahun Buku Y-1

Program yang telah dilakukan dalam pencapaian Target Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kinerja BUMN.
2. *Monitoring* realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-update data setoran dividen.
3. Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Program yang akan dilakukan untuk pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperbaharui kebijakan dividen BUMN.
2. *Monitoring* realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-update data setoran dividen.
3. Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

SASARAN STRATEGIS 2

Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

a. Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp371,33 Triliun	Rp212,71 Triliun	Rp249,4 Triliun	78,53%	117,24%

TABEL3.22 Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

Belanja modal BUMN tahun 2022 sebesar Rp249.2 Triliun atau lebih tinggi sebesar 17,24% dari target belanja modal BUMN tahun 2022. Capex tahun 2022 masih didominasi oleh BUMN Klaster Energi Minyak dan Gas yakni PT Pertamina (Persero) sebesar Rp70.07 Triliun dan PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp51.69 Triliun.

Nilai realisasi tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp212,71 triliun dikarenakan terdapat belanja modal yang dilakukan oleh BUMN untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bisnis. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021, maka realisasi ini turun sebesar 21,47%.

Capex (Rp T)	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Infrastruktur	268,5	298,7	285,8	209,0	278,6	218,0
Non Infrastruktur	46,1	149,3	80,5	145,8	38,7	31,4
TOTAL	314,6	448,1	366,3	354,8	317,3	249,4

*Data Unaudited dan Prognosa 2022

Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam peningkatan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional dalam hal realisasi belanja modal pada tahun 2022, yaitu melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja BUMN. BUMN diminta untuk rutin melaporkan belanja modal yang dilakukan secara periodik.

Kementerian BUMN mendorong BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek investasi dengan tetap melanjutkan pengembangan lapangan. Untuk memaksimalkan proyek tersebut, program-program yang dapat dilakukan diantaranya:

- Strengthen Core**
yakni investasi yang dilakukan di kegiatan yang mendukung bisnis utama perusahaan, namun tidak terbatas pada eksplorasi dan pengembangan bisnis.
- New Green Bussiness**
yakni investasi yang dilakukan dalam rangka mendukung penerapan ESG dalam upaya kinerja yang berkelanjutan. Diharapkan operasional bisnis BUMN dapat mengutamakan keseimbangan lingkungan, keseimbangan sosial, serta tetap memperhatikan tata Kelola perusahaan yang baik.
- Digitalization to support business and operational.**
merupakan investasi yang dilakukan dalam bidang digital dalam rangka untuk mendukung proses bisnis, operasi, dan keberlanjutan perusahaan.

b. Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Tambahan Kapasitas Terpasang oleh BUMN/ Tambahan Kapasitas Terpasang Nasional	63,30%	15,70%	36,90%	58,29%	244,37%

TABEL3.28 Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT

Kementerian BUMN mendukung capaian kinerja Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPT) Tahun 2022, Kementerian BUMN juga turut memberikan dukungan berupa pengembangan energi baru terbarukan yang terbagi ke dalam beberapa BUMN dengan uraian kapasitas terpasang tambahan sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero) tambahan kapasitas terpasang sebesar 24,85 MW
2. PT PLN (Persero) tambahan kapasitas terpasang 172,25 MW;
3. PT LEN (Persero) tambahan kapasitas terpasang 511,62 MW.

Total kapasitas tambahan terpasang Pembangkit EBT BUMN pada tahun 2022 sebesar 708,72 MW. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi tambahan kapasitas terpasang BUMN terhadap tambahan kapasitas terpasang nasional 2022 sebesar 1.921,8 MW adalah 36,90% atau apabila dibandingkan dengan target Kementerian BUMN adalah tercapai sebesar 235,03% dari target 15,70% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Seperti pada BUMN Binaan Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas, Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 berkontribusi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pada tahun 2022, PT Pertamina memperoleh tambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 24,85 MW. EBT menjadi fokus pada RKAP PT Pertamina (Persero), komitmen untuk menambah kapasitas terpasang EBT dituangkan dalam KPI Direksi secara kolektif pada tahun 2022. Proyek PLTS EBT berkontribusi terbesar oleh PLTS Rokan tahap I sebesar 17 MW, PLTS Tanjung Uban sebesar 1,7 MW dan AP II (BSH 3) sebesar 1,4 MW.

PT PLN (Persero) memperoleh tambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 172,25 MW. Pencapaian EBT tersebut berkontribusi terbesar oleh PLTP IPP Sorik Merapi sebesar 12,50 MW, PLTHMH IPP Madong sebesar 11,39 MW dan PLTM Batu Gajah sebesar 10 MW.

PT LEN (Persero) memperoleh tambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 511,62 MW terutama dari proyek PLTS Kupang. Program yang dilakukan dalam rangka pencapaian target tahun 2022 yaitu memindahkan kepemilikan PLTS Kupang dari PT Len (Persero) ke PT SEI sebagai anak perusahaan yang berfokus pada Renewable Energy, sehingga pengoperasian dan maintenance bisa dimaksimalkan dan bernegosiasi dengan PLN untuk mengangkat pembatasan energi listrik yang dialirkan kepada PLN.

Program yang akan dilakukan untuk pencapaian target tahun 2023 yaitu:

1. Melakukan monitoring yang lebih komprehensif terhadap progress pembangkit yang akan dan sedang dibangun secara berkala.
2. Melakukan monitoring taktis melalui site visit di pembangkit-pembangkit EBT yang sedang dibangun.

SASARAN STRATEGIS 3

Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

a. Net Profit

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp124,71 Triliun	Rp75,37 Triliun	Rp303,74 Triliun	243,55%	402,99%

TABEL3.29 Capaian Net Profit

Realisasi Net Profit BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp303,74 triliun atau 402,99% dibandingkan dengan target seiring dengan peningkatan kinerja pada sebagian besar klaster pada tahun 2022. Hal ini utamanya didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, penguatan harga komoditas utama, pemulihan kegiatan ekonomi serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi. Peningkatan net profit pada tahun 2022 juga disebabkan oleh adanya pengakuan keuntungan atas restrukturisasi utang BUMN.

Perkembangan realisasi Net Profit BUMN dari tahun 2015 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Net Profit Tanpa Eliminasi	149,77	176,18	186,39	185,67	165,37	40,99	126,86	341,94
Net Profit Dengan Eliminasi				150,38	124,99	13,29	124,71	303,74

*Data Unaudited per 10 Februari 2023

Program yang telah dilakukan dalam pencapaian Target Net Profit Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 yang didalamnya terdapat aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan dengan parameter: ekspansi EBITDA dan CFO serta Net Profit dan Dividen.
2. Menandatangani Kontrak Manajemen Tahun 2022 yang memuat target Key Performance Indicator Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil (fair).
3. Melakukan monitoring kinerja BUMN secara triwulanan.

b. Kapitalisasi Saham BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp1.910 Triliun	Rp2.043,59 Triliun	Rp2.201 Triliun	115,23%	107,58%

TABEL3.31 Capaian Kapitalisasi Saham BUMN

Kapitalisasi Saham BUMN dan Anak BUMN pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.201 triliun, lebih tinggi Rp157,41 triliun dibandingkan target sebesar Rp2.043,59 Triliun. BUMN telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar pada tahun 2022 mencapai 23% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Di tengah dan paska pandemi COVID-19, BUMN terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola (*governance*). Selain itu, program dan strategi dalam mempercepat pertumbuhan BUMN dinilai krusial memberikan kontribusi perekonomian Indonesia dan berpengaruh pada kapitalisasi saham BUMN.

Program yang akan dilakukan untuk pencapaian target 2023 yaitu mendorong BUMN menyiapkan mitigasi risiko dan strategi dalam menghadapi inflasi, kenaikan suku bunga dan perlambatan ekonomi. Selain itu, penerapan prinsip *Environmental, Social dan Governance* (ESG) dinilai dapat menjadi motor dalam menggerakkan kapitalisasi pasar

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN BUMN

Pada tahun 2022, Kementerian BUMN mencapai realisasi anggaran sebesar 99,06% atau sebesar Rp196.555.127.045,- dari pagu sebesar Rp198.426.521.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,15%. Capaian realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 sebesar 98,91% atau sebesar Rp190.942.482.059,- dari pagu sebesar Rp193.047.600.000,-.

Dalam mencapai target realisasi anggaran tahun 2022, Kementerian BUMN telah melakukan monitoring evaluasi bulanan untuk mengidentifikasi kendala-kendala pelaksanaan anggaran pada unit kerja serta melakukan optimalisasi anggaran dengan merealokasi anggaran kepada unit-unit yang lebih membutuhkan.

Pada tahun 2022, Kementerian BUMN mengalami 3 (tiga) kali automatic adjustment (pemblokiran anggaran) oleh Kementerian Keuangan, dengan total akumulasi sebesar Rp9.819.154.000,-. Hal tersebut berdampak pada kegiatan unit kerja yang perlu banyak melakukan efisiensi serta perubahan waktu pelaksanaan kegiatan agar tetap dapat mencapai output sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Program yang akan dilakukan dalam pencapaian target pada tahun 2023, Kementerian BUMN akan menyusun sistem penilaian kinerja anggaran pada masing-masing unit kerja dengan mengadopsi sistem IKPA pada Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan sistem reward and punishment guna meningkatkan awareness penganggaran di unit kerja.

Selain itu, pada tahun 2023 akan dilakukan monitoring yang lebih ketat dalam pelaksanaan anggaran agar inline dengan Rencana Penyerapan Anggaran yang sudah disusun dan memfokuskan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih strategis bagi unit kerja.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2022

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan sebuah inisiatif Kementerian BUMN untuk membangun secara berkelanjutan dengan fokus pada manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi bisnis BUMN yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun program yang telah dijalankan antara lain:

1. Pemberian Bantuan Tanggap Bencana kepada Masyarakat

Selama Tahun 2022, Kementerian BUMN dan BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah menyalurkan berbagai macam bantuan kepada Masyarakat dalam rangka tanggap bencana. Berikut beberapa bantuan yang telah disalurkan:

Bantuan Tanggap Bencana Banjir dan Longsor Bank Mandiri

POSKO PASAR YOUTEFA



PENYALURAN 125 NASI KOTAK
& KARTON AIR MINERAL

LOKASI PENGUNGSIAN MASYARAKAT ALASRI YOUTEFA



PENYALURAN 300 NASI KOTAK

SABTU, 05 JANUARI 2022

UMHAT 02 JANUARI 2022

Pelantikan UMKM Sembalun Batch I Antara



Program Berdaya Bersama Perempuan Difabelpreneur-Holding Danareksa



Pembekalan Keahlian Menjahit Lanjutan Program Pemberdayaan Narapidana Ex Narkoba sebagai Bekal Mandiri dan Sosialisasi Masyarakat – PT Inka



Rumah Kelola Ikan Larantuka, NTT-PT Pelni



3. Bantuan Peningkatan Kualitas Lingkungan

Bantuan Air Bersih Lebak, Labuan Bajo, dan Adonara



Aksi Menanam ANTARA

Kantor Berita ANTARA bersama ANTARA Biro Kalimantan Barat melakukan penghijauan melalui kegiatan Aksi Menanam ANTARA "Bersama Kita Tumbuh, Hijaukan Beranda Negeri" yang diselenggarakan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada 26 Januari 2022. Kegiatan penghijauan ini merupakan upaya Kantor Berita ANTARA untuk menjaga keasrian di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas, baik di daerah pemukiman maupun objek wisata. Kantor Berita ANTARA menanam sebanyak 1.500 bibit pohon Pinang, Tabubuya, Trambesi, Jengkol dan Petai yang disebar di enam wilayah, yaitu area Kampus Politeknik Negeri Sambas, area Kampus IAS, Kota Pemangkat, Pos Lintas Batas Negara Aruk, Daerah Paloh dan Objek Wisata Bukit Piantus.



Program Menjaga Ekosistem Laut

Sekitar 160 bibit anakan terumbu karang diambil dari Lava Flow yang berlokasi di sekitar Gunung Api Banda dengan kedalaman 6 sampai 7 meter. Anakan terumbu karang ini kemudian ditempel di media tanam yang terbuat dari beton berdiameter 4 inchi dengan dukungan meja yang terbuat dari besi dengan ukuran 90 x 120 m2. Sebanyak delapan meja yang telah ditempel anakan terumbu karang kemudian ditenggelamkan dan disusun di selat antara Pulau Lonthoir, Pulau Gunung Api dan Pulau Neira pada kedalaman sekitar 10 meter.



Program Tanam 1000 Pohon Bersama



4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Mandiri Sahabat Disabilitas Tanah Air (DITA)



ANTARA Goes to Campus Politeknik Negeri Sambas

Bulan Januari 2022, tepatnya pada 27 Januari 2022, ANTARA mengadakan ANTARA Goes to Campus Politeknik Negeri Sambas bertajuk "Edukasi Foto dan Video Jurnalistik" dengan biaya sebesar Rp19.973.000 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dalam acara ini, ANTARA menghadirkan tiga narasumber, yaitu Pewarta Video ANTARA Ahmad Faishal Adnan, Pewarta Foto ANTARA Wahyu Putro Arinto dan Kontributor Bito ANTARA Kalimantan Barat Rendra Oxtora. Mahasiswa tidak hanya diedukasi mengenai jurnalistik foto dan jurnalistik video, tetapi juga diberikan edukasi mengenai hoax dan cara pencegahannya.



Bantuan Program Pendidikan Kewirausahaan 2022 - Perum Peruri

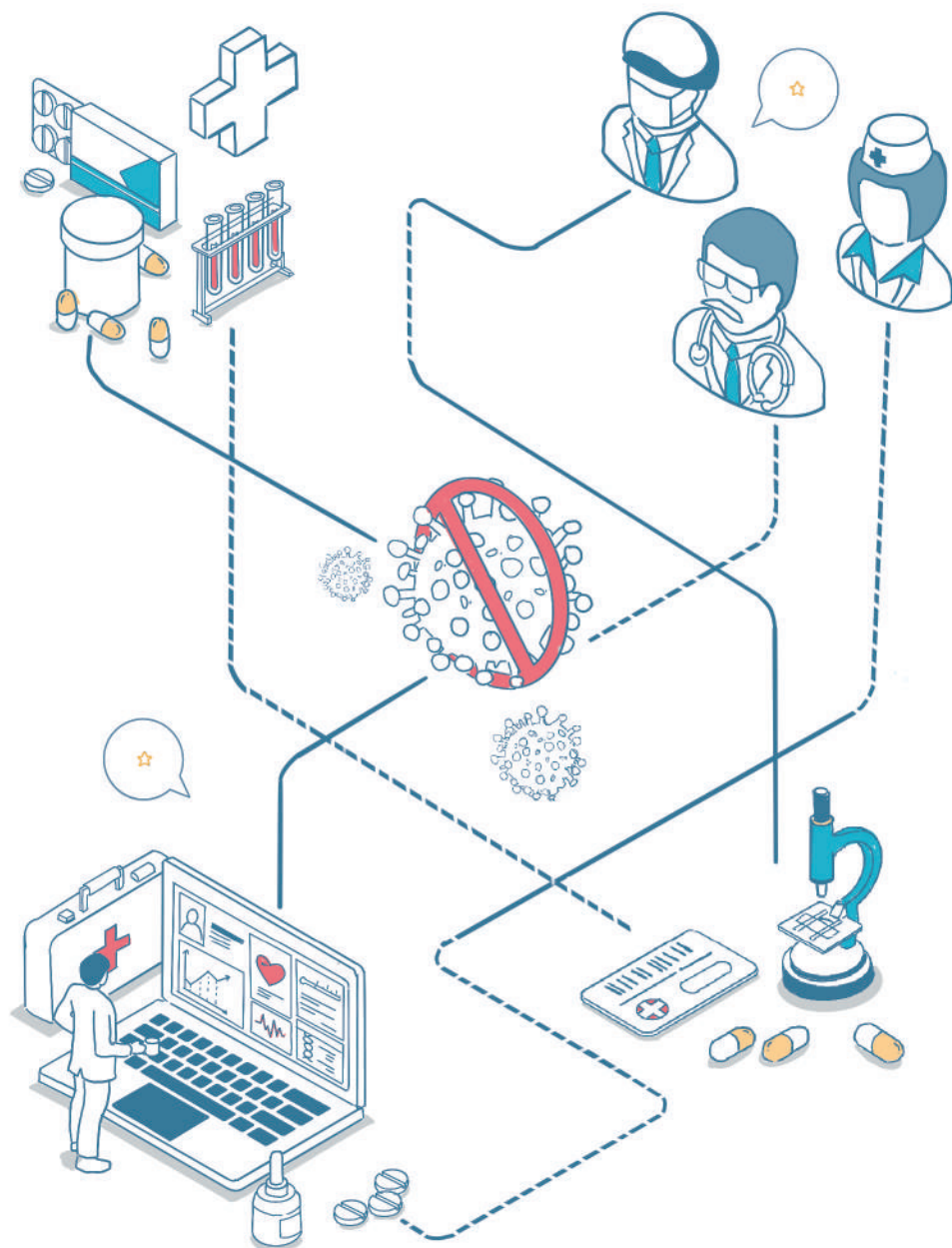






PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN

4



BAB 4 : PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN

- A. Penerapan Kombinasi Kebijakan Work From Office (WFO), Work From Home (WFH) dan Fleksibilitas Tempat Bekerja (FTB)
- B. Digitalisasi Proses Bisnis
- C. Program Vaksinasi Kementerian BUMN
- D. Klinik Kementerian BUMN
- E. Investasi Pemerintah

PENERAPAN KOMBINASI KEBIJAKAN WORK FROM OFFICE (WFO), WORK FROM HOME (WFH) DAN FLEKSIBILITAS TEMPAT BEKERJA (FTB)

A

Pada tahun 2022, Indonesia masih dibayangi Pandemi COVID-19 dilakukan kombinasi kebijakan WFH, WFO dan FTB di lingkungan Kementerian BUMN dengan pertimbangan masih adanya kasus Covid19. Meskipun terjadi penurunan kasus Covid19, Satgas Covid19 Kementerian BUMN tetap melakukan langkah-langkah antisipasi penyebaran kepada seluruh Pegawai Kementerian BUMN, antara lain dengan sosialisasi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman) dimanapun berada;

1. Penggunaan masker medis sekali pakai selalu diganti;
2. Saling mengingatkan orang yang ada di dekat pegawai untuk menerapkan protokol kesehatan
3. Disiplin menerapkan jadwal WFH-WFO dengan penuh tanggung jawab.

DIGITALISASI PROSES BISNIS

B

Kebijakan Work from Home dan Fleksibilitas Tempat Bekerja yang diterapkan pada tahun 2022 tentunya berdampak terhadap pelaksanaan proses bisnis di Kementerian BUMN. Optimalisasi proses bisnis secara digital terus disempurnakan antara lain melalui penggunaan teleconference, presensi digital dengan Face Recognition dan GPS hingga tanda tangan elektronik.

PROGRAM VAKSINASI KEMENTERIAN BUMN

C

Dalam menyukseskan program Vaksinasi secara Nasional, Kementerian BUMN juga turut melaksanakan Program Vaksinasi Booster kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN baik pada dosis ketiga dan keempat dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

KLINIK KEMENTERIAN BUMN

B

Sejak 1 Juli 2021 Kementerian BUMN telah memiliki Klinik kelas Pratama, Layanan ini ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN (Aparatur Sipil Negara/ASN dan Non-ASN), dengan total hampir 420 orang di tahun 2021 dan lebih kurang 590 orang diestimasikan pada tahun 2022. Layanan yang diberikan antara lain:

a. Layanan Pertolongan Pertama Kedaruratan.

b. Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum.

c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi oleh Dokter Gigi.

d. Pemberian Resep Dokter

e. Pemeriksaan kesehatan sederhana berupa pemeriksaan kolesterol, gula darah dan asam urat

a. Konsultasi kesehatan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi

b. Layanan pemeriksaan kesehatan rutin Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN

c. Dukungan kegiatan/aktifitas Kementerian BUMN yang membutuhkan layanan tenaga kesehatan.

e. Dukungan terhadap program-program pemerintah terkait kesehatan termasuk salah satunya Program Penguatan Implementasi Diteksi Dini Penyakit Tidak Menular, dan program pemerintah lainnya

Klinik Pratama Kementerian BUMN dikelola secara internal oleh Tim Pengelola Klinik yang dibentuk berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-11/S.MBU/04/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Klinik Pratama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan disupport oleh 6 (enam) Tenaga Kesehatan dari Telkomedika (sebagai pemenang kontrak in-house Tenaga Kesehatan untuk Pengelolaan Klinik) yang terdiri dari 1 (satu) Dokter Umum, 1 (satu) Dokter Gigi, 1 (satu) Perawat Umum, 1 (satu) Perawat Gigi, 1 (satu) Apoteker, dan 1 (satu) Admin. Operasional klinik tersedia sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari kerja Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 16.00 WIB.

Saat ini Klinik Pratama Kementerian BUMN telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi seluruh Pegawai Kementerian BUMN, Khususnya bagi dukungan layanan kesehatan Pegawai baik dalam kondisi darurat maupun regular dan telah cukup baik mengedukasi Pegawai untuk dapat memahami lebih terkait pola hidup sehat dan cara pencegahan diri dari penyakit.

INVESTASI PEMERINTAH

E

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Kementerian BUMN ditugaskan untuk mengelola anggaran Investasi Pemerintah yang merupakan bagian dari Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) yang didalamnya terdapat anggaran Investasi Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.02/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.02/2022 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2022 dan sesuai yang tertuang dalam DIPA BA 999.03, alokasi anggaran Investasi Pemerintah kepada BUMN yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp57,27 Triliun yang terdiri atas tambahan PMN sebesar Rp56,07 Triliun dan Investasi Pemerintah dalam rangka PEN sebesar Rp1,20 Triliun.

1. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal Negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pada tahun 2022 PMN terbagi atas dua yaitu PMN Tunai Non PEN dan PMN Tunai dalam Rangka PEN. PMN Tunai Non PEN diberikan kepada BUMN dalam rangka dukungan penyertaan modal negara kepada BUMN dan Program PMN PEN diperuntukkan untuk mendukung BUMN dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Adapun rincian BUMN penerima PMN Tunai Non PEN, PMN Tunai dalam rangka PEN tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal	Keterangan
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Rp5,00 Triliun	PP 27 Tahun 2022
2	PT Utama Karya (Persero)*	Rp31,35 Triliun	PP 47 Tahun 2022 PP 60 Tahun 2022
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Rp7,50 Triliun	PP 43 Tahun 2022
4	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Rp1,97 Triliun	PP 32 Tahun 2022
5	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp2,48 Triliun	PP 48 Tahun 2022
6	PT Waskita Karya (Persero)*	Rp3,00 Triliun	PP 34 Tahun 2022
7	Perum Perumnas	Rp1,57 Triliun	PP 54 Tahun 2022
8	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp3,20 Triliun	PP 62 Tahun 2022
TOTAL		Rp56,07 Triliun	

*PMN Tunai dalam rangka PEN

2. Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, telah diatur tentang mekanisme pemberian IP PEN kepada BUMN.

Mekanisme IP PEN ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak triwulan I tahun 2020 sehingga pemerintah mengambil langkah responsif dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Anggaran IP PEN 2022 merupakan lanjutan program penyaluran yang sudah dimulai sejak tahun 2020. Program ini dcairkan kepada BUMN sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan Pelaksana Investasi.

BUMN Penerima Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) selama tahun 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal	Keterangan
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Rp 1,20 Triliun	KMK 293/KMK.02/2022

Adapun BUMN Penerima Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) tahun 2020 – 2025 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal	Keterangan
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Rp8,50 Triliun	s.d. 31 Desember 2022 telah cair sebesar Rp1,00 Triliun, dan sebesar Rp7,50 Triliun dikembalikan kepada Negara untuk selanjutnya dikonversi menjadi PMN

No	BUMN	Nominal	Keterangan
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp3,50 Triliun	s.d. 31 Desember 2022 telah cair sebesar Rp3,50 Triliun
3	Perum Perumnas	Rp0,650 Triliun	s.d. 31 Desember 2022 telah cair sebesar Rp0,65 Triliun
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Rp4,00 Triliun	s.d. 31 Desember 2022 telah cair sebesar Rp2,96 Triliun
5	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Rp3,00 Triliun	s.d. 31 Desember 2022 telah cair sebesar Rp2,20 Triliun
TOTAL		Rp19,65 Triliun	





PENUTUP 5

PENUTUP

Dalam mewujudkan 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah menetapkan program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2022, Kementerian BUMN telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, disebabkan adanya faktor eksternal dan kendala teknis lainnya. Selain itu tahun 2022 masih dibayangi pandemi COVID-19 turut berpengaruh dalam pencapaian kinerja Kementerian BUMN dan BUMN. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan yang mempengaruhi pencapaian target ke depannya yang selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun di periode berikutnya.

Dari total 20 (dua puluh) IKU, sebanyak 18 (delapan belas) IKU telah tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara masih terdapat 2 (dua) IKU yang belum mencapai target yaitu: (1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan (2) Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN. Adapun IKU yang berhasil mencapai target yaitu (1) Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global, (2) Pembentukan Holding BUMN, (3) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNB), (4) Realisasi Belanja Modal (CAPEX), (5) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan, (6) Net Profit, (7) Kapitalisasi Saham BUMN, (8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE), (9) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN, (10) Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat, (11) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN, (12) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan, (13) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO, (14) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak Produktif, BUMN tidak sehat), (15) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri, (16) BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0, (17) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN dan (18) Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih selama tahun 2022, tentunya Kementerian BUMN akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, agar berbagai program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan peran Kementerian BUMN bagi Negara dapat dioptimalkan. Adapun langkah perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan Kementerian BUMN kedepannya, antara lain.

- a. Mengevaluasi IKU yang telah berhasil mencapai target maupun tidak tercapai pada tahun 2022 dan menyusun langkah-langkah strategis untuk perbaikan di tahun berikutnya.
- b. Mengevaluasi proses perencanaan kinerja dan cascading kinerja agar selaras untuk mencapai tujuan organisasi Kementerian BUMN.
- c. Mengoptimalkan program unggulan serta menyusun langkah – langkah strategis agar seluruh Tujuan, Sasaran Strageis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN dapat tercapai dengan hasil terbaik.
- d. Melakukan Benchmarking ke Instansi Pemerintah dan Perusahaan berkelas regional yang memiliki pengelolaan kinerja organisasi dan/atau reformasi birokrasi.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 Desember 2021

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ERICK THOHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional			
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	85,6 (Tinggi)
		2) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,25 M/Org
		3) Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	18%
		4) Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	8%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,2 (Indeks)
		6) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN			
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	7) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70%
		8) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	90%
		9) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	10) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	36
		11) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	50%
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN			
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	12) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	42



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian BUMN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023
Inspektur,

Suprianto

NIP 196511151986031001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
		13) BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	12 BUMN/anak
6	BUMN Unggul di Kancan Global	14) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN
		15) Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	2 <i>Holding</i>
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan			
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	16) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp403,71 T
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	17) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp212,71 T
		18) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	15,70%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk Pemegang Saham	19) Net Profit	Rp75,37 T
		20) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.043,59 T

Program

1. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN

2. Program Dukungan Manajemen

Total Anggaran

Anggaran

Rp 55.264.781.000,00

Rp152.980.894.000,00

Rp208.245.675.000,00

Jakarta, 17 Desember 2021

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR



LAMPIRAN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	85,6 (Tinggi)	n.a	n.a	n.a	85,6	Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022.
2.	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,25 M/Org	Rp3,10 M/Org	Rp3,15 M/Org	Rp3,20 M/Org	Rp3,25 M/Org	Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan BUMN dan Jumlah Tenaga Kerja Tetap BUMN.
3.	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Direksi BUMN	18%	10%	15%	17%	18%	Diperoleh dari perbandingan antara Direksi perempuan dan total Direksi pada 41 BUMN
4.	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	8%	5%	6,5%	7%	8%	Diperoleh dari perbandingan antara keterwakilan Direksi berusia ≤42 tahun dan total Direksi pada 41 BUMN
5.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,2 (Indeks)	n.a	n.a	3,2	3,2	Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah terkait.
6.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	n.a.	n.a.	WTP	WTP	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
7.	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70%	n.a	n.a	n.a	70%	Pada Tahun 2022 ditargetkan BUMN yang berkategori sehat sebesar 70%.
8.	Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	90%	60%	70%	80%	90%	Jumlah/Progress Regulasi Tata Kelola BUMN yang telah diharmonisasi.
9.	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100%	n.a.	n.a.	n.a.	100%	Berasal dari hasil survei kepada BUMN untuk menunjukkan kepatuhan BUMN dalam hal regulasi.
10.	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	36	n.a.	n.a.	n.a.	36	Jumlah anak BUMN yang telah melakukan IPO pada bursa saham.
11.	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	50%	n.a.	n.a.	n.a.	50%	Berdasarkan data RKAP Tahun 2022.
12.	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	42	n.a.	n.a.	n.a.	42	Target jumlah negara tujuan ekspor didasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas pada saat pembahasan RPJMN 2020-2024.
13.	BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	12 BUMN/anak	n.a.	n.a.	n.a.	12 BUMN/anak	Target Tahun 2022 didasarkan pada jumlah BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
14.	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN	n.a.	n.a.	n.a.	5 BUMN	Target 5 BUMN terdiri : 1. PT Pertamina (Persero) 2. PT Telkom (Persero) Tbk 3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
15.	Pembentukan Holding BUMN	2 Holding	n.a.	n.a.	n.a.	2 Holding	Pada Tahun 2022 ditarget holding BUMN yang akan terbentuk yaitu Holding Danareksa dan Holding BUMN Industri Pertahanan.
16	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNPB)	Rp403,71 T	Rp100,92 T	Rp201,85 T	Rp302,78 T	Rp403,71 T	Target pada tahun 2022 merupakan angka RKAP 2022. (Trajectory : 25%, 50%, 75%, 100%)
17	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp212,71 T	Rp53,17 T	Rp106,35 T	Rp159,53 T	Rp212,71 T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2022. (Trajectory : 25%, 50%, 75%, 100%)
18	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Terbarukan	15,70%	10%	12,5%	14%	15,70%	Persentase kontribusi EBT BUMN dibandingkan kapasitas terpasang Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
19	Net Profit	Rp75,37 T	Rp18,84 T	Rp37,68 T	Rp56,52 T	Rp75,37 T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2022. (Trajectory : 25%, 50%, 75%, 100%)
20	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.043,59 T	Rp1.900 T	Rp1.941 T	Rp2.002 T	Rp2.043,59 T	Berdasarkan data RKAP 2022.

Jakarta, 17 Desember 2021

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


ERICK THOHIR



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta Pusat 10110

www.bumn.go.id

